



**PENOLAKAN PEMERINTAH TURKI DI BAWAH ADALET VE KALKINMA
PARTISI (AKP) TERHADAP KUDETA MILITER MESIR TAHUN 2013**

***(THE REFUSAL OF TURKISH GOVERNMENT BY ADALET VE KALKINMA
PARTISI (AKP) AGAINST THE MILITARY COUP OF EGYPT IN 2013)***

SKRIPSI

Oleh

AHMAD MAS'UDI BUDIANA

NIM 100910101076

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PENOLAKAN PEMERINTAH TURKI DI BAWAH ADALET VE
KALKINMA PARTISI (AKP) TERHADAP KUDETA MILITER MESIR
TAHUN 2013**

***(THE REFUSAL OF TURKISH GOVERNMENT BY ADALET VE
KALKINMA PARTISI (AKP) AGAINST THE MILITARY COUP OF EGYPT
IN 2013)***

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada program Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial**

Oleh

AHMAD MAS'UDI BUDIANA

NIM 100910101076

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW;
2. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
3. Ibu Mudji Astuti dan Bapak Nur Jasin (Alm), yang tercinta;
4. Kakak-kakakku yang terkasih: Mb Ni'mah, Mb Nafi', Mas Luqman, Mas Ahmad, Mas Ammal, Mb Dewi;
5. Kawan-kawan KAMMI Jember dan Siklus FISIP, yang selalu menemani dan menyemangati dalam perjuangan;
6. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis sampaikan terima kasih atas dukungannya.

MOTO

“Tidak ada kepuasan sampai karya jadi tuntas, dan tidak ada kenikmatan melebihi apa yang mungkin diciptakan oleh kelelahan”.*



* Anis Matta. 2004. *Mencari Pahlawan Indonesia*. Jakarta: The Tarbawi Center. Hal 65.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Mas'udi Budiana

NIM : 100910101076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“Penolakan Pemerintah Turki Di Bawah *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP)
Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013” adalah benar-benar hasil karya
sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada
institusi manapun serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas
keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juni 2015

Yang menyatakan

Ahmad Mas'udi Budiana



SKRIPSI

**PENOLAKAN PEMERINTAH TURKI DI BAWAH *ADALET VE*
KALKINMA PARTISI (AKP) TERHADAP KUDETA MILITER MESIR
TAHUN 2013**

Oleh

AHMAD MAS'UDI BUDIANA

NIM 100910101076

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agung Purwanto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penolakan Pemerintah Turki di Bawah Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juni 2015
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Agung Purwanto, M.Si
NIP 196810221993031002

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP 195904231987021001

Anggota I

Anggota II

Honest Dody Molasy, S.Sos., M.A
NIP 197611122003121002

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Penolakan Pemerintah Turki Di Bawah *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013; Ahmad Mas'udi Budiana, 100910101076; 2015: 82 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Turki memasuki era baru semenjak partai AKP memenangkan pemilu dan memimpin Turki pada tahun 2002. Semenjak itu, Turki berperan sebagai penegak demokrasi di kawasan Timur Tengah. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji hubungan Turki-Mesir dan upaya Turki dalam mendukung penegakan demokrasi di Mesir. Secara emosi dan sejarah terdapat kesamaan dan kedekatan hubungan antara Turki dengan Mesir. Hubungan ini semakin kuat ketika partai *Freedom and Justice Party* (FJP) memenangkan pemilu di Mesir pada tahun 2012. Pemilu yang mengantarkan kemenangan FJP adalah pemilu demokratis yang pertama kali dilaksanakan di Mesir sejak berdirinya negara Mesir.

Metode analisis yang penulis gunakan untuk mengkaji fenomena dalam tulisan ini yaitu metode deskriptif. Menggunakan metode ini meliputi teknik pengumpulan data dan analisis data. Data tersebut kemudian penulis olah dengan metode deskriptif. Berdasarkan teori dan data yang penulis gunakan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Turki yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi; 1) AKP menguasai parlemen Turki, 2) Perubahan doktrin politik luar negeri Turki, 3) Dukungan rakyat Turki terhadap Presiden Mursi, 4) Faktor sejarah Turki. Sedangkan faktor eksternal meliputi; 1) Presiden Mursi terpilih secara demokratis, 2) Penggunaan cara represif yang dilakukan oleh militer Mesir, 3) Kesamaan kepentingan antara Turki-Mesir terhadap isu Palestina dan 4) Masyarakat internasional tidak segera bersuara dan menentukan sikap yang tegas terhadap kudeta Mesir.

PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah SWT, Robb Semesta alam. Hanya pada-Nya segala pujian diperuntukkan. Segala puji juga milik-Nya atas segala nikmat yang penulis dapatkan sehingga mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Penolakan Pemerintah Turki Di Bawah *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013”**. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis berharap semoga dengan dituliskannya skripsi ini dapat menambah wawasan dan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga kepada para pembacanya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Almater Universitas Jember, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Dra. Agung Purwanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Drs. M. Nur Hasan, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang sangat berkontribusi besar dalam membimbing dan mengarahkan penulis baik secara teknis maupun moril.
3. Drs. Alfian Jamil, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Dosen dari jurusan/program studi lain yang telah membagi dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Universitas Jember.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, atas segala bantuan yang telah diberikan.
6. Ibu Mudji Astuti dan Bapak Nur Jasin (alm), terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, didikan dan juga arahnya.
7. Teman-teman ilmu Hubungan Internasional Univ. Jember, terkhusus angkatan '10, terima kasih atas dukungan, motivasi dan semangat yang diberikan.

Penulis sadari bahwa karya tulisan ini masih jauh dari sempurna, penulis turut berharap masukan, saran dan koreksian dari semua pihak demi kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Mei 2015

Penulis

Ahmad Mas'udi Budiana

100910101076



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Argumen Utama	9
1.7 Metode Penelitian	10
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	10
1.7.2 Metode Analisis Data	11
1.8 Sistematika Penulisan	12
BAB II. DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN TURKI.....	13
2.1 Sistem Pemerintahan Turki.....	13
2.2 Sekulerisme Turki.....	16
2.3 Lahir Partai Islam	19

2.3.1 Partai AKP	21
2.3.2 Karakteristik <i>Adelet ve Kalkinna Partisi</i> (AKP)	23
2.4 Pergeseran Kebijakan Turki ketika AKP Memimpin	26
2.4.1 Peran Militer Dalam Pemerintahan Turki	27
2.4.2 Politik Luar Negeri Turki di Bawah AKP	30
BAB III. KERJASAMA TURKI-MESIR DAN KUDETA MESIR	37
3.1 Kerjasama Turki dengan Mesir	37
3.1.1 Kerjasama Politik Turki-Mesir	37
3.1.2 Kerjasama Ekonomi Turki-Mesir	39
3.2 Kepemimpinan Muhammad Mursi.....	44
3.3 Kudeta Militer Mesir 2013	49
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP KUDETA MESIR 2013	53
4.1 Persepsi AKP Terhadap Kudeta Mesir	53
4.2 Keputusan Pemerintah Turki Menolak Kudeta	57
4.3 Faktor-faktor Pertimbangan Pilihan	58
4.3.1 Faktor pertimbangan internal Turki	59
4.3.2 Faktor Pertimbangan Eksternal Turki.....	66
4.4 Implikasi Hubungan Turki-Mesir Pasca Kudeta	72
BAB V. KESIMPULAN	75
Daftar Pustaka.....	76

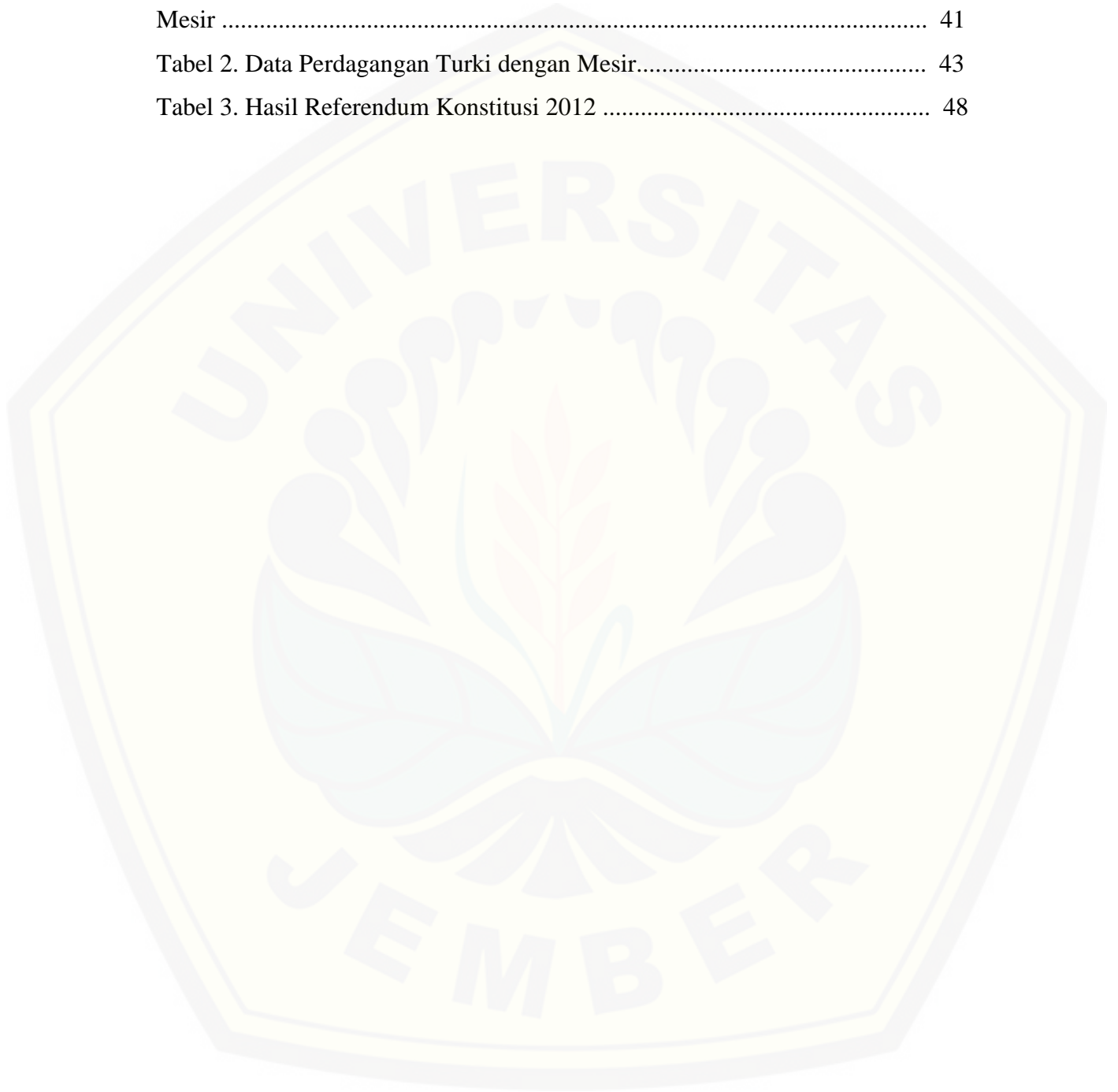
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aksi unjuk rasa anti kudeta militer Mesir di Turki..... 65



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Peningkatan Ekspor-Import dan Volume Perdagangan Turki dengan Mesir	41
Tabel 2. Data Perdagangan Turki dengan Mesir.....	43
Tabel 3. Hasil Referendum Konstitusi 2012	48



DAFTAR SINGKATAN

AKP	: Adalet Ve Kalkinma Partisi
FJP	: Freedom and Justice Party
TGNA	: The Grand National Assembly
PON	: Partai Orde Nasional
PKN	: Partai Keselamatan Nasional
DYP	: Dogru Yol Partisi
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
IM	: Ikhwanul Muslimin
FIOE	: Federation of Islamic Organization in Europe
FTA	: Free Trade Agreement

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Turki merupakan negara Republik Parlementer yang mayoritas berpenduduk Muslim. Sebelum sistem Republik Turki di proklamirkan, Turki adalah pusat dari Pemerintahan Islam yang berbentuk kesultanan. Pada saat itu Turki dipimpin oleh seorang Sultan. Kesultanan Turki bertahan sampai pada tahun 1924. Setelah itu, konstitusi Turki berganti menjadi sekuler yaitu Republik Demokratik Sekuler yang dipelopori oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal menginginkan Turki menjadi negara yang modern. Negara modern dalam pandangan Mustafa Kemal yaitu negara yang mengikuti peradaban Barat. Sejak saat itu, pemerintahan Turki membatasi kebebasan berpolitik untuk menjaga kesekuleran Turki yang di pegang oleh militer .

Pada tahun 2002, Turki mulai mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Budaya demokratis mulai tumbuh. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari partai pemenang pemilu pada tahun 2002 yaitu partai *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP). Banyak perubahan kebijakan yang terjadi di Turki ketika partai tersebut memimpin Turki. Perubahan kebijakan di bawah kepemimpinan AKP yaitu konstitusi sekuler tidak sekaku pada periode sebelumnya. Kebebasan berpendapat, berperilaku dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Semua golongan mulai mendapat perhatian yang periode sebelumnya sempat terpinggirkan seperti pada suku Kurdi.

Sejak dipimpin oleh AKP, secara perlahan kebijakan luar negeri Turki berubah orientasi. Ada sikap yang tidak biasa dimainkan oleh Turki. Turki secara perlahan menarik kedekatannya dengan Barat. Turki merubah doktrin politik luar negerinya menjadi konsep *Strategic Depth* dan *Zero Problem* yaitu memanfaatkan kelebihan Turki baik secara geografi, budaya serta pengaruh sejarah sebagai alat

Turki dalam berinteraksi dalam kancah dunia Internasional.¹ Dengan demikian, strategi politik luar negeri Turki yang baru yaitu menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan dengan keterbukaan dan penerapan politik *soft power* kepada negara tetangga. Arah dan orientasi politik luar negeri ini telah secara signifikan mengubah sikap politik regional. Kasus perubahan doktrin politik luar negeri Turki dapat dilihat pada peristiwa kudeta militer di Mesir tahun 2013.

Pada tahun 2012 secara resmi Mesir mendapatkan Presiden baru yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang demokratis. Presiden tersebut bernama Muhammad Mursi. Ia adalah orang pertama yang menduduki jabatan Presiden Mesir dari kalangan sipil dan Islamis. Pada tahun 2013, Mesir mengalami kudeta yang dilakukan oleh militer. Kudeta ini dipicu oleh kekhawatiran pihak militer terhadap kebijakan Presiden Mursi yang membuat referendum baru yang dimungkinkan bisa merubah undang-undang negara. Menanggapi isu tersebut, pihak militer segera merespon dengan berusaha mengambil alih sistem pemerintahan, Militer Mesir di bawah komando Letnan Jenderal Abdul Fattah As-Sisi dan meminta Mursi untuk mundur dari jabatan Presiden.

Turki segera menentukan sikapnya, menanggapi isu kudeta militer di Mesir Turki dengan tegas menolak kudeta. Penolakan kudeta Turki justru di tengah negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Australia, Arab Saudi diam dan belum menentukan sikap.² Turki menilai bahwa kudeta yang dilakukan oleh militer dapat menodai dan merusak nilai demokrasi yang selama ini selalu diperjuangkan oleh negara Barat dan Timur. Proses transisi kekuasaan ini baru berjalan di Mesir bermula dari penggulingan Presiden Husni Mubarak dan masih perlu pengawalan dari berbagai pihak untuk mewujudkan negara yang demokratis. Dalam negara yang demokratis, satu keputusan tidak bisa diubah atau dibatalkan kecuali dengan cara demokratis pula. Suara atau aspirasi rakyat sangat

¹ Yeghig Tashjian.2012. *From Conceptualization to Implementation and Revaluation: Turkey's "Strategic Depth" in the MENA region*, diakses dari www.strategicoutlook.org pada tanggal 28 Oktober 2014.

² Palupi Annisa Auliani.2013. *Turki Tarik Dubes di Mesir dan Kecam Standar Ganda Barat atas Situasi Mesir*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/16/0515267/contact.html>, pada tanggal 30 Oktober 2014

menentukan pilihan negara. Cara kudeta militer sangat tidak dibenarkan dalam proses demokratisasi karena akan merusak nilai demokrasi.

Kudeta Militer Mesir sangat mengganggu hubungan bilateral yang sudah terbangun antara Pemerintah Turki dengan Pemerintahan Mesir baik secara politik, ekonomi ataupun sosial. Ketika Rezim Husni Mubarak tumbang dan mulai memasuki masa transisi dan berakhir dengan terpilihnya Presiden Mursi sebagai Presiden Mesir, Turki banyak membantu Mesir terutama terkait bidang perdagangan, investasi maupun keuangan untuk meningkatkan perekonomian. Sekitar 250 perusahaan Turki telah menginvestasikan hampir \$ 2 milyar di Mesir baik berupa perusahaan tekstil, retail, makanan dan konstruksi.³

Perdana Menteri Erdogan mengancam keras tindakan militer Mesir yang mengintervensi perpolitikan Mesir. Penolakan Turki tidak bisa dilepaskan dari sejarah Turki di masa lalu. Ia menyatakan bahwa kudeta akan membawa akibat yang sangat berat bagi rakyat dan juga akan memperburuk keadaan dalam negeri baik dari ekonomi ataupun kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan ini, Perdana Menteri Erdogan pernah menyampaikan dalam sebuah pidato sebagai berikut:

“Kudeta itu jahat. Kudeta mengorbankan rakyat, masa depan, dan demokrasi. Saya ingin ini diungkapkan oleh semua orang dengan keberanian. Saya terkejut dengan sikap Barat. Parlemen Eropa mengabaikan nilai-nilainya sendiri dengan tidak menyebut intervensi militer di Mesir sebagai kudeta. Hal ini adalah tes ketulusan dan Barat telah gagal”.⁴

Perdana Menteri Erdogan selain mengancam kudeta juga mengancam tindakan militer Mesir yang sangat represif dalam menghadapi pendukung Mursi yang mengakibatkan jatuh korban kurang lebih menewaskan 638 orang dan melukai 4.000 orang pada hari Rabu 14 Agustus 2013.⁵ Penolakan Perdana Menteri Erdogan tidak hanya disampaikan melalui pidato resmi kenegaraan

³ Oguz Karamuk. 2012. *Will Erdogan's Policies Endanger Turkish Investments in Egypt?*. diakses dari <http://www.al-monitor.com/pulse/fa/business/2013/07/turkey-businessmen-egypt-fear-erdogan-support-morsi.html#>, pada tanggal 30 Oktober 2014

⁴ M Irwan Ariefyanto. 2013. *PM Turki Kecam Kudeta Militer di Mesir*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/06/mpibwk-pm-turki-kecam-kudeta-militer-di-mesir> pada tanggal 30 Oktober 2014

⁵ *Ibid*

melainkan juga pada pidato-pidato di berbagai daerah dalam negeri maupun ketika melakukan kunjungan ke luar negeri seperti di Rusia dan PBB.⁶ Dalam pidato majelis umum PBB Erdogan menyatakan kesangsiannya terhadap legitimasi Abdul Fattah As-Sisi sebagai Presiden Mesir.⁷

Setelah peristiwa penyerangan tentara kudeta kepada ribuan pendukung Mursi di lapangan *Rabia al-Adawiya Square* Perdana Menteri Erdogan memprakarsai simbol perlawanan kepada tentara kudeta Mesir dengan simbol empat jari atau yang biasa disebut dengan *Rabia*.⁸ Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh rakyat Turki. Ribuan rakyat Turki berkumpul di dekat dinding Bizantium kota Istanbul Turki untuk menolak dan mengecam kudeta militer di Mesir dan memberi dukungan terhadap Mursi. Ketika kudeta militer terjadi di Mesir, investor-investor Turki yang berada di Mesir mulai cemas. Akhirnya mereka menutup toko ataupun pabrik mereka⁹ untuk menghindari kerugian

Menanggapi kritikan dan kecaman yang terus dilakukan oleh Perdana Menteri Erdogan akhirnya Mesir mengusir Duta Besar Turki. Begitu juga dengan Turki mengusir duta besar Mesir yang bertugas di Turki artinya duta besar Mesir di Turki mendapat *persona non grata*.¹⁰ Akhirnya kedua negara memutuskan hubungan diplomatik¹¹ dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Cara represif yang terjadi di Mesir dalam rangka penurunan Presiden Mursi bukan yang pertama kali terjadi di Mesir. Sebelumnya cara represif juga terjadi di Mesir seperti pada proses revolusi Mesir pada tahun 1952 dan penggulingan Husni Mubarak dari Presiden Mesir.

⁶ Tim Redaksi. 2013. *Turkey and Egypt losing ground as diplomatic dispute grows*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-and-egypt-losing-ground-as-diplomatic-dispute-grows_332723.html, pada tanggal 1 November 2014

⁷ Tim Redaksi. 2014. *Turkey's Erdogan refused sitting on table with Egypt's Sisi*. Diakses dari <http://www.worldbulletin.net/news/145266/turkeys-erdogan-refused-sitting-on-table-with-egypts-sisi> pada tanggal 1 November 2014

⁸ Redaksi Sinai. 2013. *Rabia Simbol Keteguhan dan Perlawanan*. Diakses dari <http://www.sinaimesir.net/2013/08/rabia-simbol-keteguhan-dan-perlawanan.html>, pada tanggal 1 November 2014

⁹ *Op cit*. *Security at stidake, Turkish firms suspend Egypt operations*.

¹⁰ Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-*persona non grata* biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi.

¹¹ *Op cit*

Fenomena kebijakan Turki menolak dan menentang kudeta militer Mesir tahun 2013 ini menarik untuk diteliti karena telah beberapa kali Mesir mengalami pergolakan politik dengan cara represif. Namun demikian, dalam setiap peristiwa tersebut, hubungan politik dan kerjasama antara Turki dan Mesir tidak mengalami ketegangan. Bahkan ketika Husni Mubarak (Presiden Mesir) digulingkan, Turki sepenuhnya mendukung tindakan tersebut dan pasca penggulingan, Turki siap memberikan bantuan dan dukungan kepada Mesir untuk mewujudkan negara yang demokrasi.¹² Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Turki pada aksi penurunan Mursi pada tahun 2013 dimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara Islam seperti Saudi Arabia “diam” tidak mengeluarkan sikap. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti alasan dibalik sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Turki. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis mengangkat judul :

**“Penolakan Pemerintah Turki Di Bawah *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP)
Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam setiap penulisan suatu karya ilmiah sangat diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan. Pembatasan tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk membatasi permasalahan yang ada agar tidak melebar atau keluar dari topik bahasan. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan dalam setiap penelitian. Batasan ini berfungsi untuk menunjukkan ruang lingkup pembahasan suatu fenomena yang penganalisisannya mencakup wilayah, gejala-gejala yang muncul dari objek yang diteliti dalam karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah ini,

¹² Tim Redaksi.2011.*Turki bantu Mesir di masa transisi demokrasi*. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110913_turkey_egypt.shtml pada tanggal 1 November 2014

penulis memfokuskan pada pembahasan tentang faktor yang melatarbelakangi penolakan Pemerintah Turki dalam menanggapi kudeta Militer di Mesir pada tahun 2013.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu berfungsi untuk memfokuskan waktu terjadinya fenomena dari permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis batasi dari awal mula pergolakan demokratisasi di Mesir yaitu pada awal tahun 2011. Batasan akhir dari penelitian ini yaitu pada bulan November 2013 dimana Pemerintah Turki menyatakan penolakan dan menentang kudeta militer di Mesir dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan problematika mendasar yang diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah. Masalah sendiri dianggap sebagai kesulitan yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah oleh peneliti. Munculnya sebuah permasalahan merupakan langkah awal untuk memulai pembahasan sekaligus memberikan pusat pemikiran agar penganalisaan dan pembahasan tidak melebar untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengangkat permasalahan yang difokuskan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

“Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi penolakan Pemerintah Turki di bawah *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) terhadap kudeta militer Mesir tahun 2013?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian dari karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui latar belakang alasan pemerintah Turki menolak kudeta militer Mesir yang terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Mursi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan

keilmuan dalam studi Hubungan Internasional dan untuk memahami latar belakang suatu negara dalam menentukan suatu kebijakan atau sikap politik.

1.5 Kerangka Konseptual

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.¹³ Teori sebagai perangkat preposisi yang terintegrasi secara sintidaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati, dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴

Kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam karya tulis ini yaitu teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) dari Richard C. Snyder yang meneliti suatu pembuatan keputusan berdasarkan faktor Internal dan Eksternal. Konsep ini penulis pilih karena dirasa sesuai dalam membantu mengurai dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat.

Teori Pembuatan Keputusan Menurut Richard C. Snyder

Menurut Richard C. Snyder, dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, hal utama yang harus diamati yaitu proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Keputusan yang diambil pada akhirnya merupakan satu titik tolak dari suatu negara untuk memulai kebijakannya baik di dalam negeri maupun terhadap negara lain.

Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah suatu proses. Proses yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Richard C. Snyder menyebutkan adanya faktor internal dan eksternal setting yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.¹⁵ *Setting* didefinisikan sebagai seperangkat hal-hal

¹³ Mochtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal 186.

¹⁴ Glean E, Snellbecker, dalam : Lexy j. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal 61.

¹⁵ Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds). 1962. *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the Study of International Politics*. New York: The Free Press. Hal. 203

ataupun kejadian yang relevan dengan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang potensial yang mempunyai pengaruh pada tindakan suatu negara.

Asumsi dasar perspektif pengambilan keputusan Richard C. Snyder yaitu bahwa segala tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pelaku politik domestik, dimana para pemimpin negara (baik secara individu ataupun kelompok) bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan.¹⁶ Teori pengambilan keputusan Richard C. Snyder menunjukkan bahwa faktor apapun yang bersinggungan dengan politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*). Apabila ingin memahami suatu keputusan politik suatu negara harus melihat dari sudut pandang dan perspektif dari orang yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan tersebut.¹⁷

Richard C. Snyder menjelaskan bahwa *setting internal* dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peran kepemimpinan, persepsi, arus informasi yang didapat, dampak dari kebijakan luar negeri dan sistem kepercayaan para pembuat keputusan merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh suatu negara. Teori Richard C. Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya, apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis ataupun beresiko.¹⁸

Teori Richard C. Snyder menyatakan bahwa faktor Internal dan eksternal *setting* mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. *Setting* internal sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri seperti lingkungan non-manusia (kondisi politik/Pemerintahan), lingkungan manusia berupa masyarakat, penduduk dan kebudayaan. *Setting* internal berupa struktur serta perilaku sosial berjalan

¹⁶ Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs. Hal. 7

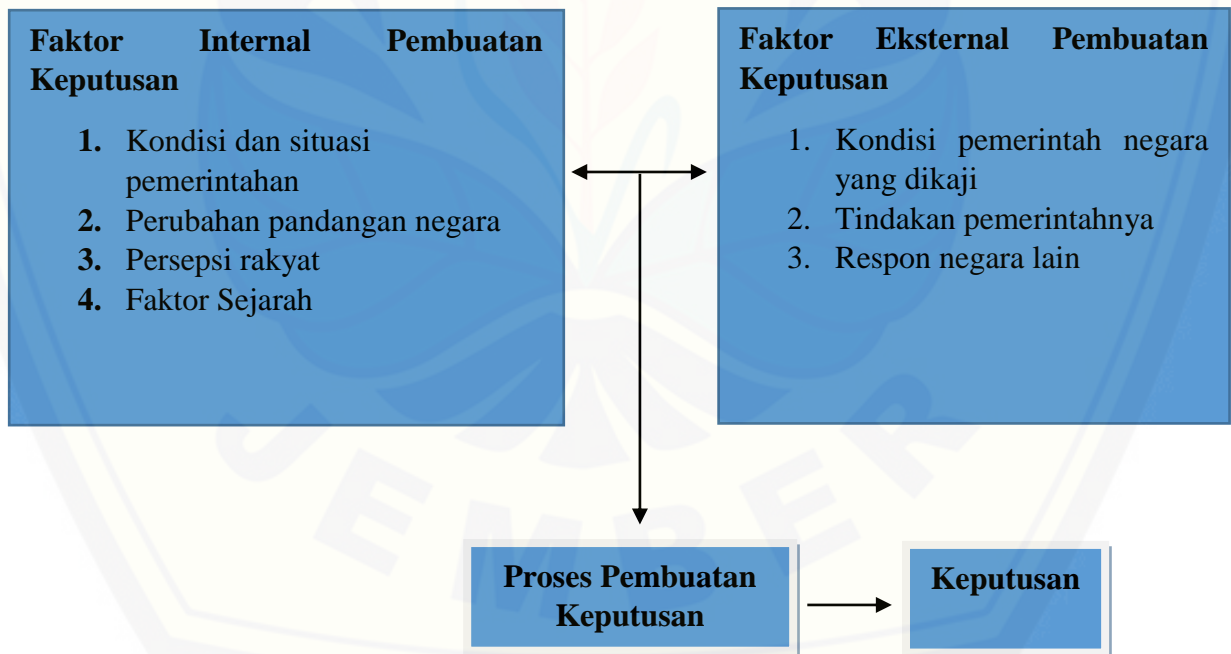
¹⁷ Snyder e.al. dalam Varma, SP. 2010. *Teori politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 392.

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani.2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 64

beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pertimbangan yang lain yaitu *setting* Eksternal. *Setting* Eksternal dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain lingkungan non-manusia (kondisi politik/Pemerintahan), budaya-budaya luar, masyarakat luar dan tindakan Pemerintah lainnya dalam hal ini tindakan negara lain.

Berdasarkan pertimbangan *setting* internal dan eksternal, para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri. Artinya, sebelum memutuskan suatu kebijakan suatu negara terlebih dulu mempertimbangkan tiga hal yang mengiringinya, yaitu *perception* (tanggapan awal), *choice* (pilihan) dan *expectation* (harapan).

Berikut ini adalah kerangka berpikir penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan Pemerintah Turki di bawah *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) terhadap kudeta militer Mesir pada masa Pemerintahan Mursi.



1.6 Argumen Utama

Argumen utama pada dasarnya adalah dugaan tentang hubungan diantara konsep-konsep. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kerangka konseptual yang telah penulis kemukakan maka penulis mengajukan argumen utama sebagai berikut :

Alasan penolakan pemerintah Turki di bawah *Adalet Ve Kalkinma* (AKP) terhadap kudeta militer Mesir tahun 2013 yaitu dari segi pertimbangan internal Turki yaitu para kader AKP telah mendominasi di parlemen, perubahan doktrin politik luar negeri Turki sejak AKP berkuasa, sikap rakyat Turki yang menolak kudeta militer. Sedangkan secara eksternal yaitu proses terpilihnya Presiden Mursi yang secara demokratis dan masih banyaknya dukungan rakyat Mesir yang mendukung Presiden Mursi, sikap *repressif* yang dilakukan pihak militer Mesir dalam upaya menjatuhkan Presiden Mursi dan sikap pasif yang ditunjukkan oleh negara-negara besar dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan lain sebagainya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini untuk membantu penulis terutama dalam membuktikan dan menguji argumen utama yang telah diajukan. Menurut Sugiono, metode ilmiah adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini didapat dari data-data sekunder yang dilakukan dengan observasi tidak langsung dari sumber data. Data sekunder artinya data yang penulis dapatkan dari sumber tidak langsung yaitu dari buku, jurnal, makalah maupun situs internet. Penulis tidak

menggunakan data primer yang berarti data di dapat langsung dari proses interaksi dengan pelaku-pelaku peristiwa, yang tentunya sulit untuk dilakukan. Data-data yang diperoleh oleh penulis berasal dari buku-buku, berita surat kabar, jurnal ilmiah, serta data elektronik dari situs internet baik secara resmi milik lembaga pemerintahan, pendidikan ataupun swasta yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Data-data sekunder yang penulis gunakan, penulis peroleh dari :

Tempat untuk mendapatkan data-data sekunder

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sumber literatur penulis dapatkan dari

1. Buku
2. Situs Internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka, tahap selanjutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan dari data-data yang diolah. Metode yang dimaksud di sini adalah cara berpikir penulis dalam menelaah berbagai fenomena kajian serta pengorganisasian data-data atau sumber tulisan. Sehubungan dengan data yang akan dianalisis merupakan data kualitatif yaitu data yang berupa pencatatan deskriptif yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan maka pola analisa data yang digunakan adalah pola analisa kualitatif.

Metode analisis data digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang akan diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisa data deskriptif.¹⁹ Metode deskriptif penulis pilih yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Metode tersebut memungkinkan penulis untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji

¹⁹ Sugiono.2008. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, kualitatif &R&D*, Bandung: Alfabeta. Hal.2

argumen utama, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.

Dari pengujian fakta dan konsep yang ada maka akan diperoleh kesimpulan alasan Pemerintah Turki menolak kudeta militer Mesir yang terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Mursi.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistem penulisan yang penulis rancang sebagai berikut,

BAB I : Pada bab ini, penulis memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini, penulis membahas tentang dinamika politik dan pemerintahan di Turki

BAB III : Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan tentang kerjasama Turki dengan Mesir dan kudeta Mesir

BAB VI : Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan tentang faktor internal dan eksternal Turki menolak kudeta militer Mesir.

BAB V : Bab lima berisi kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini. Rangkuman dari bab-bab sebelumnya beserta fakta dan argumen yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Bab ini menandai berakhirnya penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN TURKI

Sebelum sistem Republik Turki di proklamirkan, Turki adalah pusat dari Pemerintahan Islam yang berbentuk kesultanan. Pada saat itu, Turki dipimpin oleh seorang Sultan. Sultan mempunyai kekuasaan temporal dan spiritual yaitu memiliki dua kekuasaan, kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam. Sistem tersebut, bertahan di Turki kurang lebih selama enam abad berturut-turut sejak tahun 1281-1924 M.²⁰

Pasca Pemerintahan Islam, Pemerintahan Turki berganti di pimpinan oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal dikenal sebagai bapak pembaharu Turki. Mustafa Kemal menginginkan Turki menjadi negara yang modern. Negara modern dalam pandangan Mustafa Kemal yaitu negara yang mengikuti peradaban Barat. Turki harus melupakan sejarah masa lalu untuk menjadi negara yang modern. Oleh karena itu, agenda penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilakukan. Pada tanggal 1 November 1922, Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat Pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki.²¹ Sistem Pemerintahan Turki berganti menjadi Republik Konstitusional yang demokratis, sekuler dan kesatuan.

2.1 Sistem Pemerintahan Turki

Sejarah politik Turki Modern dapat dibedakan menjadi dua periode. Pertama adalah periode antara tahun 1921 sampai 1950 yang merupakan periode keotoriteran presidensial, reformasi agama dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Kedua dari tahun 1950 sampai sekarang merupakan periode sistem

²⁰ Tim Redaksi. 2009. *Sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah*. Diakses dari file.upi.edu/.../Sejak_mundur_dan_berakhirnya_era_Abbasiyah.pdf pada tanggal 25 November 2014

²¹ Tim Redaksi. 2004. *cumhuriyetin kuruluş tarihi nedir*. Diakses dari <http://www.turkcebilgi.com/cumhuriyetin-kurulusu-tarihi> pada tanggal 25 November 2014

politik multi-partai dan periode berkembangnya diferensiasi sosial. Pada awal periode kedua tersebut, budaya demokratis sudah mulai muncul dan berkembang.²²

Periode pertama yaitu ketika Mustafa Kemal menjabat sebagai Presiden Turki. Pada saat itu kebebasan berpolitik sangat dibatasi, baik di ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pada periode ini kepartaian menggunakan sistem satu partai dengan partai *Cumhuriyet Halk Partisi* atau Partai Rakyat Republik (RPP) sebagai pemegang kekuasaan. Partai Republik Rakyat adalah partai politik yang dibentuk oleh Mustafa Kemal untuk menjalankan pemerintahan. Pembatasan kebebasan berpolitik pada periode ini disebabkan ada kekuatiran para penguasa RPP bisa berkurangnya kekuasaan mereka²³ dan untuk menjaga nilai-nilai sekuler dengan tujuan untuk membentuk negara Turki yang modern. Sejarah Turki pada periode awal menunjukkan bahwa Pemerintahan Kemalis dengan sistem Pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi kemunculan partai oposisi.

Selama Mustafa Kemal menjabat Presiden, sistem Pemerintahan Turki adalah Republik Presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang dominan, baik di ranah negara maupun pemerintahan. Sistem yang berlaku cenderung otoriter dan kaku. Kedaulatan negara sepenuhnya ada pada nasional Turki sedangkan rakyat tidak diberi kekuasaan karena dikuatirkan memberi perubahan menuju demokrasi liberal.²⁴

Pola pemerintahan satu partai bertahan di Turki selama dua dasawarsa dan baru berakhir pada tahun 1945. Pada tahun tersebut, Pemerintah mulai mengizinkan pendirian partai-partai politik.²⁵ Bergantinya sistem kepartaian dari satu partai ke multipartai berpengaruh juga pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Turki berganti dari Republik Presidensial ke Republik Parlementer.

²² Ira M Lapidus. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 88

²³ Erik J. Zürcher. 2004. *The Kemalist One-Party State dalam Turkey A Modern History*. New York NY 10010 Hal 176

²⁴ *Constitution of The Republic of Turkey*. 2007. Diakses dari http://www.global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf pada tanggal 21 Januari 2015

²⁵ *Party History*. 2009. diakses dari http://www.chp.org.tr/en/?page_id=67 pada tanggal 25 November 2014

Presiden selaku kepala negara dan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Setelah perubahan ke sistem parlementer, peran Presiden hanya secara seremonial.

Periode kedua yaitu pada tahun 1950. Tahun ini menjadi awal sejarah bagi Turki karena merupakan tahun awal dilaksanakannya pemilu dengan sistem kepartaian multipartai yang diikuti oleh *Democrat Party*, *Republican People's Party* dan *National Party*. Pada pemilu ini dimenangkan oleh partai Demokrat (*Democrat Party*) yang dipimpin oleh Adnan Menderes, hal itu juga berarti berakhirnya kekuasaan Partai Republik Rakyat. Pemerintahan baru Turki mencoba mengoreksi penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dilakukan oleh Partai Republik Rakyat sejak berdirinya Republik Turki di bawah pimpinan Partai Demokrat. Walaupun demikian, partai ini tidak menginginkan ada perubahan ideologi di Turki. Sejak masa pemerintahan Partai Demokrat, budaya demokrasi Turki mulai dihidupkan. Masyarakat lebih bebas dalam beraktifitas. Masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Turki dapat melakukan kembali shalat di masjid-masjid umum dan melakukan ibadah naik haji yang pada masa Kemalıs sulit dilakukan. Selain itu, madrasah-madrasah kembali di buka.²⁶

Nilai demokratis semakin kuat berkembang di Turki setelah AKP memenangkan pemilu pada tahun 2002. Perubahan budaya politik berbanding lurus dengan perubahan pola pikir masyarakat Turki. Masyarakat semakin terbuka untuk menjadi suatu bangsa yang modern dan demokratis dengan tidak melupakan sejarah ke-Turki-an.

Sejak amandemen konstitusi 2007, Presiden Turki dipilih oleh Parlemen (*The Grand National Assembly/TGNA*). Presiden terpilih kemudian mengangkat Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian menyusun Dewan Menteri, dengan susunan yang telah disetujui oleh Presiden. Presiden tidak dapat memberhentikan Menteri tanpa proposal dari Perdana Menteri. Perdana Menteri yang menjalankan Pemerintahan sehari-hari di Turki. Perdana Menteri dan Dewan Menteri tidak

²⁶ Tim Redaksi. 2014. *Memori yang Tidak Boleh Lupa*. Diakses dari <http://www.eraMuslim.com/berita/tahukah-anda/eropa-dan-kemal-attarturk-hancurkan-setiap-aktifitas-yang-inginkan-khilafah-islam.htm#.VMg3fyE5H0> pada tanggal 25 November 2014

bertanggung jawab kepada Presiden, melainkan bertanggung jawab kepada Parlemen.

Jabatan Presiden Turki bukan hanya menjadi simbol negara. Namun demikian, Presiden juga mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pimpinan militer,²⁷ mengembalikan seluruh produk undang-undang (kecuali Undang-undang Anggaran) kepada Parlemen untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya. Jika Parlemen bersikeras untuk tetap memberlakukan undang-undang tersebut tetapi Presiden menolak, Presiden dapat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi guna memutuskannya. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengadakan Pemilu ulangan jika terjadi kebuntuan politik.

2.2 Sekulerisme Turki

Republik Turki diproklamkan oleh Mustafa Kemal pada tahun 1923. Namun demikian, republik permanen Turki, baru didirikan pada Maret 1924 bersamaan dengan dihapuskannya sistem kekhalifahan. Sistem kekhalifahan dihapus karena menurut Mustafa Kemal jabatan kepala keagamaan di kalangan dunia Islam dianggap lebih tinggi dari jabatan Presiden.²⁸ Apabila jabatan kepala agama masih dipegang khalifah, hal itu berarti dunia Islam masih menaruh harapan terhadap Turki. Sejak saat itu usaha pembaratan (*westernisasi*) mulai dilakukan oleh Mustafa Kemal yang akhirnya melahirkan sistem Sekuler di Turki.²⁹ Mustafa Kemal berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia berpikiran bahwa dengan meniru Barat, negara Turki akan maju. Dalam suatu pidato Mustafa Kemal menyampaikan bahwa kelanjutan hidup suatu masyarakat di dunia modern menghendaki perubahan dalam diri sendiri. Pada zaman yang ilmu pengetahuan dijunjung tinggi, maka bangsa yang berpegang teguh pada

²⁷ *Duties and Powers*. 2009. Diakses dari <http://www.tccb.gov.tr/pages/Presidency/power/> diakses pada tanggal 25 November 2014

²⁸ Faruk Alpkaya. 1998. *Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: 1923-1924*. Istanbul: İletişim. Hal. 199

²⁹ Tim Redaksi. 2013. *How Atatürk Made Turkey Secular*. diakses dari <http://lostislamichistory.com/how-ataturk-made-turkey-secular/> diakses pada tanggal 25 November 2014

pemikiran dan tradisi tidak akan dapat mempertahankan wujudnya. Masyarakat Turki harus dirubah untuk menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban seperti Barat.

Pada pidato pembukaan di Dewan Nasional 1 Maret 1924, Mustafa Kemal menyampaikan tiga hal yang isinya adalah menyelamatkan dan menjaga stabilitas Republik, pembentukan sistem pendidikan terpadu dan keharusan untuk mengurangi pengaruh Islam dengan menghindarkannya untuk dijadikan instrument politik sebagaimana yang dilakukan Turki pada masa yang lalu. Pada tanggal 8 April 1924, Mustafa Kemal menghapuskan pengadilan syariat. Untuk itu ia memerintahkan penyusunan perundang-undangan hukum sipil dengan mengadopsi perundang-undangan Barat sesuai dengan kebutuhan rakyat Turki. Beberapa tahun kemudian, Turki memiliki undang-undang di bidang obligasi, perdagangan, kelautan, kriminal, perdata dan sistem yurisdiksi yang mengatur perundang-undangan tersebut.³⁰ Reformasi di bidang hukum dilakukan sebenarnya merupakan perpanjangan dari kebijakan untuk memisahkan Islam dari urusan negara.

Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh rezim Mustafa Kemal yaitu tahun 1925 melarang beberapa *thariqat* sufi. Pada tahun 1927 pemakaian *tarbus*³¹ dilarang. Pada tahun 1928, diberlakukan tulisan latin yang menggantikan tulisan Arab, dan dimulai upaya memurnikan bahasa Turki dari muatan Bahasa Arab dan Bahasa Persi serta menetapkan bahasa Turki sebagai bahasa resmi negara. Pada tahun 1935, seluruh warga Turki diharuskan menggunakan nama kecil sebagaimana berlaku pada pola nama Barat dan menetapkan Ankara sebagai ibu kota negara Turki. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal bertujuan untuk memutus nilai budaya Islam yang sudah berkembang di masyarakat Turki dan menggantinya dengan budaya Barat.

Sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal tidak sampai menghilangkan agama. Sekularisasinya berpusat pada kekuasaan golongan ulama dalam urusan negara dan dalam sosial politik. Dalam urusan politik dan negara,

³⁰ Syafiq A Mughni. 1999. *Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki*. Tangerang Selatan: Logos. Hal. 149

³¹ Penutup kepala khas Turki, seperti Kopiah

ulama tidak perlu ikut campur. Ia tidak setuju dengan ide negara Islam ataupun pembentukan negara berdasarkan semangat agama. Negara mesti dipisahkan dari agama. Institusi-institusi negara yang meliputi hukum, ekonomi, sosial dan politik dan pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan syariat.

Respon masyarakat Turki terhadap sistem yang berkembang bermacam-macam. Masyarakat merasa ada kejanggalan dalam perkembangan sekulerisme di Turki. Bagi mereka sekulerisme bukannya mendatangkan kenyamanan bagi semua melainkan kecurigaan dan kebencian antara yang satu dengan yang lain. Elit Kemalis mencurigai dan membenci kalangan Islamis, sehingga terjadi oposisi biner dan kontraproduktif dengan arah pembangunan nasional Turki yang ingin setara dengan negara-negara Eropa.

Belakangan ide sekulerisme di Turki menjadi polemik tersendiri. Warga negara Turki dikekang kebebasannya dalam melaksanakan perintah agama yang mereka anut. Mereka bingung dengan tipologi sekulerisme Turki. Segala sesuatu yang berbau agama akan dianggap melakukan penghinaan atas ideologi Sekulerisme, termasuk mengenakan simbol agama juga mendapat kecaman. Hal ini seperti yang dialami oleh umat Islam Turki. Negara dengan stukturinya mencurigai setiap kelompok yang bergerak atas nama agama. Kecurigaan atas agama berdampak pula pada kebebasan berpolitik. Partai yang bergerak atas nama agama ditekan dan dilarang.

Kebingungan dan kegalauan masyarakat mendorong rakyat Turki untuk mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Budaya politik Pemerintahan seolah-olah tidak lagi mendapatkan dukungan penuh. Ada semacam pergeseran kepercayaan pada pemerintahan dan partai politik. Dengan berbagai pengalaman dan sejarah yang telah dilewati Turki, akhirnya terdapat pergeseran pada tatanan politik Turki yang berporos pada tiga pilar utama yaitu demokrasi, sekulerisme dan Islam.³²

³² Syarif Taghian. 2011. *Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekulerisme Turki*. Jakarta: Pustidaka Al-Kautsar. Hal 58

2.3 Lahirnya Partai Berbasis Islam

Pada tahun 1950 mulai bermunculan partai-partai baru, baik yang berbasis ideologi sekuler maupun yang berbasis ideologi kiri dan Islam. Sejak saat itu sistem multipartai mulai berlaku di Turki. Secara garis besar kemunculan partai berhaluan Islam mulai tampak pada tahun 1961.³³ Dalam suasana politik yang tampaknya mendukung tersebut, beberapa politisi yang berorientasi Islam seperti Necmettin Erbakan mendirikan sebuah partai bernama Partai Orde Nasional (PON) pada tahun 1969. Tetapi tidak lama berselang PON dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan menggunakan Islam untuk tujuan politik. Pengadilan menilai bahwa PON merupakan partai yang anti sekuler sebagaimana yang berlaku dan diyakini di Turki. Sebagai akibatnya, elit sekuler menolak memberikan kebebasan politik dan sipil kepada orang ataupun kelompok yang menyatakan terinspirasi keyakinan Islam.

Kader-kader partai yang dulunya di PON tidak menyerah begitu saja di bawah kekuasaan sekuler. Kader-kader tersebut pada tahun 1972 mereka mendirikan partai baru dengan nama Partai Keselamatan Nasional (PKN). PKN lebih lunak dan tidak impresif jika dibandingkan dengan partai sebelumnya (PON). Supaya bisa mempengaruhi proses politik dan untuk menunjukkan partai ini memihak pada rakyat, partai ini berusaha mengadvokasi orang-orang yang telah diasingkan dari ruang politik dan publik sejak masa-masa awal Republik berdiri. PKN menjadi kekuatan yang diperhitungkan pada pemilu 1973, ketika PKN mampu meraup 11% lebih suara. Padahal sebelumnya partai berbasis Islam tidak pernah melampaui perolehan suara lebih dari 10%. Kekuatan partai berbasis Islam kembali surut pasca kudeta 1980 yang diikuti tindakan pembubaran partai. Partai ini juga dibubarkan oleh Pemerintahan militer dengan alasan yang kurang lebih sama dengan partai pendahulunya, tidak dapat ditoleransi dalam sistem sekuler.

³³ Mustafa Erdogan, *Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam*, dalam Atilla Yayla. 2004. *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar*. Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung. 2004). Hal. 100.

Keadaan yang menguntungkan kembali didapat oleh kalangan Islamis ketika Presiden dipegang oleh Turgut Ozal yang berasal dari elemen Partai Tanah Air pada tahun 1983. Turgut Ozal termasuk kalangan Muslim moderat namun mengikuti iklim sekulerisme. Dalam kepemimpinannya, ia membawa perubahan pada demokrasi di Turki. Beberapa kebijakan dikeluarkannya untuk mengakomodasi nilai demokrasi di Turki. Ia bahkan sempat mempertanyakan kelayakan negara memiliki suatu ideologi, kelayakan militer mengontrol kebijakan negara.

Pada masa Presiden Turgut Ozal, kalangan Islamis diuntungkan untuk berkecimpung kembali dalam dunia politik dengan membentuk partai politik. Pada tahun 1980 partai Refah (PK) dibentuk setelah Dewan Keamanan Nasional mengizinkan pembentukan partai politik. Partai ini juga merupakan kelanjutan dari partai berideologi Islam yang sempat dibubarkan sebelumnya. Partai ini memiliki daya tarik tersendiri di mata publik dibuktikan dengan dimenangkannya pemilihan walikota Istanbul yang merupakan salah satu kota besar di Turki yang diselenggarakan pada bulan Maret 1994. Pada pemilihan parlemen pada Desember 1995, Partai Refah juga mendapat perhatian tersendiri karena memperoleh 21 % suara, perolehan suara yang paling tinggi diantara partai politik lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk Pemerintahan koalisi dengan *True Path Party/Dogru Yol Partisi* (DYP).³⁴ Pemerintahan koalisi tersebut berakhir dengan kudeta putih militer pada 18 Juni 1997 dan diikuti pembubaran partai Refah setahun kemudian.

Fenomena kesadaran masyarakat Turki untuk kembali mempelajari nilai-nilai Islam di tengah kebijakan sekuler pemerintah dan fenomena dukungan masyarakat terhadap kemenangan partai politik yang membawa aspirasi Islam terus memperlihatkan kemajuan ke arah yang positif. Partai turunan dari pimpinan Necmettin Erbakan tidak pernah mati. Sekelompok orang yang dulunya termasuk kader dari partai Refah berpandangan bahwa ketika kondisi politik di Turki masih belum berubah yaitu dengan berbagai pandangan negatif yang diarahkan pada

³⁴ Tim Redaksi. 2010. *Political parties in Turkey* diakses dari <http://www.allaboutturkey.com/parti.htm> diakses pada tanggal 25 November 2014

partai berhaluan Islam yang diklaim akan menjadikan Turki sebagai negara berbasis Islam dan anti sekulerisme. Tudingan tersebut baik dilakukan oleh pemerintah maupun pihak media massa. Sekelompok orang tersebut berpendapat bahwa perlu adanya langkah baru yang lebih mudah diterima oleh pemerintah maupun masyarakat. Mereka memaparkan bahwa hanya ada satu tujuan dalam politik dan itu adalah usaha untuk menjunjung tinggi moralitas. Dari pandangan ini kemudian dikulminasikan dalam formasi politik yang bernama *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP). Kelahiran AKP merupakan bentuk komitmen untuk menjadikan partai sebagai motor penting dalam langkah politik yang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai moral keislaman tanpa harus konfrontatif dengan pihak negara.

2.3.1 Partai AKP

AKP didirikan pada tanggal 14 Agustus 2001.³⁵ Partai ini diidentikkan sebagai partai reformis. Partai ini didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul. Mereka adalah kader partai yang tumbuh dan berkembang di bawah didikan Necmettin Erbakan.³⁶ Sosok Necmettin Erbakan menjadi inspirasi bagi para kalangan politikus Muslim Turki. Dalam proses pemilihan ketua, Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai ketua umum partai. Dalam sambutannya, Recep Tayyip Erdogan menyatakan sebagai berikut: “*We are not an Islamic party, and we also refuse labels such as Muslim-democrat*”.³⁷ (Kami bukan partai Islam, dan kami juga menolak label seperti Muslim-demokrat).

Walaupun demikian, dalam pergerakan AKP banyak nilai-nilai Islam yang mulai ditumbuhkan terutama dalam kurun waktu satu dekade terakhir sejak memenangi pemilu pada tahun 2002. Kemenangan tersebut berlanjut di tahun

³⁵ Tim Redaksi. 2005. *History of AKP Party*. Diakses dari <http://www.akparti.org.tr/english/> pada tanggal 25 November 2014

³⁶ Tim Redaksi. 2005. *History of The Justice and DeveloPerdana Menterient Party* diakses dari <http://www.akparti.org/turk.html> diakses pada tanggal 25 November 2014

³⁷ Ömer Taşpınar. 2012. *Turkey: The New Model?* Diakses dari <http://www.brookings.edu/research/papers/2012/04/24-turkey-new-model-taspinar> diakses pada tanggal 11 Desember 2014

2007 dan terakhir di tahun 2011. Partai ini tetap mengakui Sekuler sebagai ideologi partai.

Melalui partai AKP, Erdogan mencoba untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Turki terhadap negara dan instansi-instansinya. Harapan baru ini muncul setelah rakyat Turki putus asa terhadap praktek demokrasi yang selalu terhenti setiap kali kelompok Islam memasuki kancah politik. Pemerintahan Erbakan pernah dikudeta oleh militer dan adanya pembubaran partai-partai Islam. Meskipun banyak sekali partai-partai sekuler yang konservatif dan menguasai kancah politik dalam negeri. Namun demikian, banyak orang dan para pemilih dalam pemilu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada AKP. Meskipun partai ini memiliki kecenderungan pada suatu agama, tetapi tetap menjaga komitmen terhadap dasar-dasar aturan politik dan konstitusi negara yang menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Dalam setiap pertemuan Erdogan selalu meyakinkan bahwa AKP bukan partai Islam yang konservatif, tetapi AKP adalah partai yang moderat sebagaimana Erdogan menolak untuk bersitegang dengan partai-partai sekuler lainnya.

Berdirinya partai berbasis Islam di Turki setelah dibubarkan berkali-kali oleh Pemerintah bukanlah perkara yang terjadi begitu saja. Kurang lebih sudah 30 tahun Turki dipimpin oleh partai yang mengesampingkan nilai agama dalam kehidupan bernegara maupun sosial, dan selama itu pula Turki belum bisa keluar dari keterpurukan ekonomi yang berimbas pada kesejahteraan rakyat. Kepercayaan rakyat pada gaya pemerintahan partai penguasa lamban laun terus mengalami penurunan. Hal ini menjadikan rakyat mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah lama hilang dari budaya Turki yaitu nilai agama. Walaupun dalam kurun waktu yang sudah cukup lama pemerintah berusaha menghilangkan semangat keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui sekulerisme yang diterapkan, kepercayaan publik pada partai berbasis Islam selalu ada. Artinya semangat sekuler dalam masyarakat Turki mengalami bentuk perubahan.

Sekuler yang dipahami masyarakat Turki tidak lagi sekuler yang selalu berkiblat kepada Barat. Karena secara historis, sosiologis maupun kultural

masyarakat Turki tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nilai keagamaan. Pengaruh keagamaan begitu melekat pada pikiran dan emosi masyarakat mengingat kurang lebih selama enam abad lalu Turki dipimpin oleh sistem kekhalifahan Islam. Sekuler yang dipahami sekarang yaitu berganti Sekularisme yang menekankan bahwa metode *scientific* adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengetahuan dalam rangka menuju kemajuan.

Secara historis, budaya sekuler tidak pernah ada dan diterapkan di Turki kecuali setelah Mustafa Kemal menjabat sebagai Presiden Turki. Secara sosiologis dan kultur masyarakat Turki merupakan masyarakat yang beragama Islam. Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh Turki yaitu Badiuzzaman Said Nursi mengatakan bahwa Pemerintah Turki sudah seharusnya memberikan kebebasan dalam beragama tanpa intervensi, dan menjadikan agama Islam landasan utama perjuangan bukan sekulerisasi.³⁸

2.3.2 Karakteristik Partai AKP

Partai AKP memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan partai-partai Islam sebelumnya. Secara aturan partai dan dalam setiap kampanye partai ini tidak pernah mengaitkan dengan ideologi ataupun agenda keislaman. Namun demikian, banyak kalangan yang memperkirakan ada semangat keislaman dalam pendirian AKP. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari pendiri AKP yang dulunya adalah kader Partai Refah, partai yang berbasis Islam. AKP berusaha membahasakan nilai-nilai Islam ke dalam demokrasi yang menjunjung sekulerisme di Turki.

Kerja-kerja yang dilakukan AKP tidak pernah keluar dari aturan sekulerisme di Turki. AKP sangat menjunjung tinggi nilai moral dan aturan main yang ada dalam Pemerintahan yang notabene anti-Islam dan berprinsip sekulerisme. Pendekatan politik yang digunakan oleh AKP juga sangat moderat berbeda dengan partai-partai Islam sebelumnya yang cenderung menampilkan simbol Islam secara langsung. Dengan demikian, AKP mampu menarik simpati banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan Islamis tetapi juga dari kalangan

³⁸ M.Asror Yusuf. 2009. *Persinggungan Islam dan Barat*. Yogyakarta: Sukses Offset. Hal 156.

sekuleris. Seperti yang pernah disebutkan oleh Carolyn Fluehr-Lobban bahwa mereka, para elit AKP menolak dicap sebagai "Islamis" dan tidak pula mengedepankan isu penerapan syari'at sebagai hukum negara, Namun demikian, mereka mencitrakan diri sebagai partai Muslim moderat.³⁹

Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa AKP berada pada garis kanan-tengah, dengan pendirian Konservatif Demokrat "*conservative democracy*". Dengan pendirian ini, Recep Tayyip Erdogan juga mengajak kepada negara-negara Muslim, khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah untuk mengikuti langkah yang AKP tempuh. Berikut ini pernyataan dari Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan:

"This political party of which I am leader, AK Party, represents a new political style and understanding in Turkish political life. I believe that this new approach, based on a political identity I call "conservative democrats," has a significance that goes beyond the borders of Turkey. One observes that, like in the case of socialism, liberalism and conservatism, all political movements are going through a substantive process of interaction with each other. We know witness not a differentiation and polarization ideologies with sharp and bold lines of division between them, but the formation of new political courses accompanying the pervasiveness of different ideologies. We have before us, therefore, a more colored and multidimensional picture rather than a sharp black-and-white image. We in Turkey believe that, based on this reality, it is important to renew and strenghten politics and governance through the understanding of conservative democracy".⁴⁰

Langkah untuk memilih konservatif demokrasi merupakan opsi sadar para intelektual partai AKP yang menginginkan sebuah langkah politik yang moderat dengan menghargai perbedaan yang berlaku tanpa menghilangkan nilai-nilai warisan sejarah. Dalam memimpin AKP, Erdogan selalu menampilkan sosok Muslim yang demokratis dan terbuka dalam bidang ekonomi dan politik, serta sebagai sosok pelindung bagi rakyat. Ketika Erdogan berbicara tentang kebebasan, Erdogan mengatidakan bahwa kebebasan adalah dasar dari ideologi

³⁹ Carolin Fluehr-Lobban. 2004. *Islamic Societies in Practice*, edisi kedua. Florida: University Press of Florida. Hlm. 226-227

⁴⁰ Recep Tayyip Erdogan, "*Conservative Democracy and the Globalization of Freedom*", dalam M. Hakan Yavuz. 2006. Salt Lake: University of Utah Press. Hlm. 334

Kemalisme. Ide sekularisme radikal yang pernah diterapkan sejak beberapa dekade lamanya terhadap rakyat Turki. Erdogan tidak mendorong kebebasan ini guna melakukan pergeseran untuk melaksanakan pendirian negara yang berdasarkan asas agama.

Recep Tayyip Erdogan yakin bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat dan Erdogan percaya bahwa rakyat yang satu akan mencintai yang lainnya. Karena adanya sikap saling menghormati antara sesama. Tujuan dari politik menurutnya adalah mengeluarkan masyarakat dari kesusahan dan kondisi buruk, sehingga pemerintahan di Turki harus menguatkan nilai republik, menyeimbangkan antara pragmatisme global dengan prinsip-prinsip republik. Demokrasi Turki harus berdasarkan pada supremasi hukum, politik yang berorientasi pada publik yang didalamnya terdapat nilai-nilai integritas individu dan mengutamakan moralitas, modernitas dan humanitas.

AKP menggunakan simbol Bola Lampu yang terang benderang sebagai lambang partai. Lampu terang benderang memiliki arti yang mencerminkan lambang kekuatan untuk keluar dari keadaan yang gelap menuju keadaan yang terang benderang, "*We Are open to Light and Closed to the Darkness*". Dalam setiap pertemuan terdapat bendera-bendera yang dilatarbelakangi dengan bendera Turki sekaligus foto tokoh bersejarah Turki, Musthafa Kemal Attaturk. Semua itu ditujukan untuk menyakinkan publik dan Pemerintah Turki bahwa AKP adalah partai pembaharuan yang komitmen untuk mengeluarkan bangsa Turki dari persoalan ekonomi yang tengah krisis, selalu menjunjung tinggi moralitas dan komitmen dengan Sekulerisme-Attaturkisme.

Program-program resmi AKP dan ideologinya tidak jauh berbeda dengan platform banyak partai politik di Barat. AKP setia pada 'demokratisasi' dan konsep masyarakat sipil, aturan hukum, hak-hak kebebasan yang fundamental, dan kebijakan ekonomi liberal. Program partai AKP tidak ada yang merujuk pada Islam atau Muslim. Tidak ada satu pun kebijakan partai yang memiliki wacana keislaman. AKP telah berusaha untuk membawa moralitas, integritas dan demokrasi ke garis depan politik untuk menyatukan nilai-nilai atas dasar sistem religius dengan visi sekularisme. Turki bergerak maju ke arah *Westernisasi*

bahkan mengejar keanggotaan penuh di Uni Eropa. AKP menjadi partai yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya tradisional dan mengadvokasi prinsip-prinsip liberal dalam politik.

Dalam pentas perpolitikan kehadiran AKP memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Terbukti dengan dimenangkannya pemilihan umum (pemilu) selama 3 periode berturut-turut sejak tahun 2002. Sampai saat ini, AKP masih dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Pemerintahan Turki. Kemenangan pemilu yang pertama menjadi sinyal positif bahwa AKP telah memiliki kepercayaan yang luas baik dari kalangan Islamis maupun sekuleris. AKP mencoba ramah dan berpikiran positif atas keberlangsungan hukum sekuler yang berlaku di Turki. Pemerintahan di bawah AKP berperan sebagai penengah atas semua golongan.

Usaha elit AKP kepada publik adalah meyakinkan publik dalam nalar sekulerismenya bahwa AKP bukan partai yang mengusung agenda Islam seperti yang pernah disuarakan oleh Necmettin Erbakan. Elit AKP berusaha mengesampingkan wacana seputar agenda Islamisasi, Namun demikian, lebih mengedepankan kepentingan publik secara umum yang berdasarkan pada demokrasi.

2.4 Pergeseran Kebijakan Turki ketika AKP Memimpin

Banyak kebijakan yang berubah di Turki ketika AKP memimpin khususnya di bidang hak asasi manusia dan kebebasan. Beberapa hal yang dilakukan oleh AKP dibawah kepemimpinan Erdogan yaitu Erdogan melakukan reformasi konstitusi besar-besaran dan berbagai kepentingan lainnya. AKP mengusulkan untuk mengamandemen konstitusi untuk menjamin dan memperluas kebebasan individu supaya sesuai dengan hak asasi manusia, Seperti dibolehkannya mengenakan jilbab dan celana panjang bagi wanita di parlemen, sekolah dan tempat umum karena aturan sebelumnya dipandang menyalahi kebebasan beragama.⁴¹ Erdogan memperbolehkan kelompok pro Kurdi dan minoritas lainnya untuk menjadi anggota parlemen dan dibolehkannya

⁴¹ Tim Redaksi. 2013. *Turki Cabut Larangan Jilbab*. Diakses dari <http://www.dw.de/turki-cabut-larangan-jilbab/a-17125105> pada tanggal 14 Desember 2014

penggunakan nama dan huruf Kurdi yang sebelumnya juga dilarang. Erdogan juga mencanangkan dan merancang konstitusi yang menjamin hak individu memperoleh berbagai informasi, hak mengungkapkan pendapat secara damai dengan beragam bentuknya.

Hubungan luar negeri Turki pun juga mengalami banyak perubahan. Mulai digantinya teori strategi Turki dalam menjalin hubungan luar negeri yang langsung diimplementasikan dengan tindakan konkrit. Salah satu tindakan yang telah dilakukan Turki yaitu, Turki di bawah kepemimpinan AKP mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel. Alasan AKP mendukung kemerdekaan Palestina bukan karena Palestina negara mayoritas berpenduduk Muslim, Namun demikian karena penjajahan yang dilakukan oleh Israel merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, Erdogan dengan jajarannya berhasil menciptakan hubungan baru dengan Barat secara umum. Pemerintah memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi ini menaikkan peran diplomatis Turki di tataran internasional yang berhasil mendapat dukungan Barat sehingga bisa menetralsir pengaruh militer Turki dalam panggung politik dalam negeri, dimana selama ini Barat mendukung militer Turki dalam menjaga demokrasi.

2.4.1 Peran Militer Dalam Pemerintahan Turki

Sejak awal berdirinya Republik Turki, peranan militer tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik dan Pemerintahan Turki. Militer adalah lembaga yang pertama kali melakukan pembaharuan, dimulai pada masa Utsmaniyah hingga pada proses pembentukan Republik Turki. Militer memiliki dua alasan melakukan intervensi terhadap politik dan Pemerintahan Turki. Pertama, militer memiliki posisi penting dalam sejarah kemerdekaan Turki. Pada tahun 1919-1922 pasukan militer dibawah pimpinan Jenderal Mustafa Kamal berhasil memukul mundur pasukan sekutu yang dimotori oleh Yunani. Kemudian berdiri Republik Turki. Republik Turki pertama berdiri melalui revolusi militer, setelah itu prinsip penggulingan kekuasaan menjadi cara untuk membangun negara republik dan melestarikannya. Revolusi juga menjadi salah satu prinsip

undang-undang Turki yang diwasiatkan oleh Mustafa Kemal kepada pasukan Turki.⁴² Cara penafsiran yang khusus terhadap undang-undang menjadi sarana untuk melakukan segala tindakan. Sejak saat itu, militer memiliki kedudukan istimewa dalam Pemerintahan Turki.

Selain itu, pihak militer memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan Turki sebagai sebuah negara modern yang berpatokan pada Barat. Oleh karena itu, militer sangat mendukung dengan diterapkannya demokrasi parlementer. Walaupun pada kenyataannya terjadi ambivalensi dari sikap militer. Pada satu sisi menginginkan Turki menjadi sebuah negara demokrasi modern ala Barat, tetapi di sisi lain pihak militer selalu melakukan kudeta terhadap setiap pemerintahan yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip sekulerisme dengan dalih sebagai penjaga demokrasi.

Militer Turki tidak hanya memiliki kewenangan yang mencakup urusan domestik militer saja, namun juga memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dalam kehidupan politik. Intervensi tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian ideologi Sekuler/Kemalisme dimana militer secara eksklusif mengklaim dirinya sebagai penjaganya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kastaf angkatan bersenjata Turki, Yasar Buyukanit:

*“The military will, just as it has so far, keep its determination to guard social, democratic and secular Turkey. “The Turkish Armed Forces will not make any concessions ... in its duty of guarding the Turkish Republic, a secular and social state based on the rule of law”.*⁴³ (Militer akan tetap bertekad untuk menjaga sosial, demokratis dan sekuler Turki. Angkatan Bersenjata Turki tidak akan membuat konsesi... dalam tugasnya menjaga Republik Turki , negara sekuler dan sosial berdasarkan aturan hukum yang telah ada).

Selama berdirinya negara modern Turki, militer telah melakukan kudeta sebanyak empat kali. Pertama pada tahun 1960, pada saat pemerintahan Adnan Manderes dari Partai Demokrat yang pertama kali menentang dominasi militer

⁴² Tim Redaksi. 2010. *Constitution of the Republic of Turkey* diakses dari <http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa> pada tanggal 16 Januari 2015.

⁴³ Tim Redaksi. 2007. *Turkish military issues warning*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/08/2008525121411742479.html> pada tanggal 16 Januari 2015

dalam pemerintahan sekaligus kepemimpinannya dianggap mulai otoriter dan mendukung obsurantisme. Kedua, pihak militer memaksa Perdana Menteri Sulayman Demiral mundur dari jabatannya pada tahun 1971. Ketiga, pada bulan September tahun 1980 militer kembali melakukan kudeta terkait dengan merebaknya kekacauan dan kerusuhan sosial yang bersifat sektarian sehingga pemerintah dianggap gagal meredam aksi-aksi tersebut. Terakhir, yaitu terhadap Partai Kesejahteraan (Partai Refah) pada tahun 1997.⁴⁴ Kudeta yang dilakukan oleh militer ini beralasan bahwa pemerintahan yang ada saat itu berpotensi melencengkan ataupun merubah ideologi sekuler atau kemalisme yang sudah ada sejak tahun 1923 ke arah fundamentalisme Islam. Sejak AKP memenangkan pemilu dan menduduki puncak kekuasaan pada tahun 2002, AKP mampu membatasi pengaruh militer dalam panggung politik nasional sehingga militer Turki untuk menerima bendera perdamaian dari Pemerintah dan bersikap kooperatif.

Erdogan sangat bersikap hati-hati dan berimbang dalam menghadapi militer pada masa awal Pemerintahannya. Setidaknya ada tiga langkah moderasi yang dilakukan Pemerintahan Erdogan dalam berinteraksi dengan pihak militer⁴⁵, yaitu:

1. Pemerintah cenderung menghindari tindakan yang mendorong perlawanan keras militer
2. Pemerintah AKP membatasi dari mengkritik militer secara terbuka atas isu-isu yang dianggap sensitif oleh militer, seperti isu ideologi Kemalisme, anti-Zionisme dan Barat.
3. Erdogan menjalankan politik tarik ulur. Erdogan mendukung kebijakan militer di sepanjang menyangkut keahlian mereka dan mengkritik partnernya sendiri di parlemen. Namun di lain waktu, ia mengkritik militer jika berkaitan dengan otoritasnya.

⁴⁴ Ahmad Dzakirin. 2012. *Kebangkitan Pos-Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adicitra Intermedia. Hal 47

⁴⁵ Ibid

Tiga hal di atas Erdogan lakukan karena Erdogan memahami betul bagaimana karakter dan cara berinteraksi dengan pihak militer (kekuatan politik terbesar dan tertua) di Turki tersebut. Erdogan secara pribadi sangat menghormati militer dan memperhatikan masukan dari mereka. Meski demikian, sebagai pemimpin pemerintahan, Erdogan juga menunjukkan kepada militer siapa pemimpin sebenarnya dalam Pemerintahan yang demokratis.

Dengan berbagai keberhasilan yang dicapai Erdogan dalam menghadapi militer, militer mengkaji ulang berbagai sikap dan kebijakannya di masa lalu. Terlebih lagi setelah secara jelas bahwa nilai-nilai demokrasi di Turki semakin diutamakan dan dijunjung tinggi. Keinginan adanya perubahan pada militer Turki juga ditunjukkan oleh masyarakat Turki melalui demonstrasi pada tanggal 28 Februari 2010. Massa demonstran yang berasal dari berbagai kelompok profesi dan umum menyuarakan supaya tidak ada lagi kudeta. Karena telah terbukti bahwa berbagai kudeta militer di masa lalu telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan sekaligus menyebabkan terhentinya proses reformasi politik di Turki.

Sudah saatnya bagi militer Turki untuk benar-benar berperan sebagai penjaga demokrasi. Tidak lagi melakukan kudeta, namun lebih fokus dalam mengamankan negara sekaligus mendukung demokratisasi serta menjauhkan diri dari aktifitas politik praktis. Hal ini untuk menciptakan citra yang positif baik di masyarakat internasional ataupun regional.

2.4.2 Politik Luar Negeri Turki di Bawah AKP

Sejak berdirinya Turki pada tahun 1923, para pendiri Turki telah mencanangkan kebijakan luar negeri yang damai dan realistis. Hal ini berdasarkan prinsip “Damai di Rumah dan Damai di Dunia” yang diproklamkan oleh Mustafa Kemal, Presiden pertama Turki. Dari prinsip tersebut dapat kita pahami bahwa, dari awal berdirinya, Turki telah mewacanakan untuk berperan aktif dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional maupun internasional. Namun demikian, prinsip tersebut belum bisa dijalankan sepenuhnya pada beberapa dekade awal berdirinya republik Turki.

Pada awal pemerintahan Mustafa Kemal, Turki sadar dengan keterbatasan sebagai negara yang masih baru dan perlu dukungan negara kuat dan besar, terlebih pada saat itu juga berlangsung perang dingin. Saat itu, kekuatan politik dunia terbagi menjadi dua blok, blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dengan kebijakan *west oriented* nya Turki memilih Amerika Serikat untuk menjadi rekan pada saat itu. Turki menjadi negara satu-satunya di kawasan Timur Tengah yang menjadi aliansi Barat.

Hingga pasca Perang Dunia ke-2 berakhir, Turki masih menjadi bagian Barat yang terus menjalin kerjasama. Turki akhirnya bergabung dengan pakta pertahanan Atlantik Utara, atau yang biasa disebut NATO pada tahun 1952. Turki mempunyai peran untuk menjaga persebaran komunisme di kawasan Eropa Timur pada saat itu. Berbagai bantuan militer dan ekonomi diberikan kepada Turki oleh Amerika Serikat dengan tujuan agar Turki menjadi negara yang kuat dalam militer dan stabil dalam ekonomi. Kedekatan Turki dengan Barat terjadi hingga awal tahun 2000.

Pada tahun 2002, terjadi perubahan peta politik dalam negeri Turki. Pada saat itu pemilu Turki dimenangkan oleh partai AKP dibawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan. Selepas menangnya partai AKP dan terpilihnya Erdogan sebagai Perdana Menteri, secara perlahan kebijakan luar negeri Turki berubah orientasi. Ada sikap yang tidak biasa dimainkan oleh Turki. Turki secara perlahan menarik kedekatannya dengan Barat.

Pandangan politik luar negeri Turki berubah saat dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Erdogan. Dalam membuat kebijakan luar negeri Turki, suatu kebijakan dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri kemudian oleh Perdana Menteri diteruskan ke Parlemen. Kebijakan luar negeri Turki mengalami perubahan yang dulunya lebih condong ke Barat berganti condong ke wilayah sekitar (*regionalism*) yang lebih dikenal dengan sebutan *Strategic Depth* dan *Zero*

Problem.⁴⁶ Arti pendekatan ini adalah pandangan pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki yang lebih menitikberatkan pada hubungan yang seimbang dengan negara-negara di sekitarnya. Dengan demikian, strategi politik luar negeri Turki yang baru yaitu menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan dengan keterbukaan dan penerapan politik *soft power* kepada negara tetangga. Arah dan orientasi politik luar negeri ini telah secara signifikan mengubah sikap politik regional.

Konsep *Strategic Depth* dan *Zero Problem* membawa implikasi terhadap empat kawasan, yaitu kawasan Eropa, Rusia, Timur Tengah dan Kaukasus. Implikasi pada kawasan Timur Tengah yaitu Turki memainkan peran sebagai katalisator bagi hubungan antara negara Timur Tengah dengan Barat. Selain itu, Turki berambisi menjadi aktor utama dalam melakukan proses transformasi demokrasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Turki terus berupaya membangun kepercayaan politik negara-negara di Kawasan Timur Tengah.

Faktor pembeda antara model politik luar negeri Turki saat pemerintahan dipegang oleh Mustafa Kemal dengan AKP adalah keberhasilannya dalam menjawab keinginan masyarakat. Kemalisme yang condong kepada Barat belum mampu mengakomodir keinginan masyarakat. Sedangkan AKP dengan nilai-nilai demokrasi, sekulerisme dan Islam mampu menjawab keinginan masyarakat. Setidaknya ada 3 hal keberhasilan AKP dalam menjawab keinginan masyarakat, yaitu;

Pertama, Turki di bawah AKP berupaya menjaga keseimbangan antara keamanan dan demokrasi di dalam negeri. Turki beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan akan keamanan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Setelah Turki berhasil menciptakan keamanan dalam negeri, Turki kemudian menciptakan sebuah politik luar negeri yang merepresentasikan bahwa mereka ingin menciptakan keamanan secara wilayah dan global. Hal ini juga dilakukan

⁴⁶ Joshua W. Walker. *Introduction: The Sources of Turkish Grand Strategy- 'Strategic Depth' and 'Zero-Problem' in Context*. Diakses dari www.lse.ac.uk/IDEAS/.../pdf/.../introduction.pdf pada tanggal 25 November 2014

untuk menjamin kepentingan negara yaitu untuk menaikkan daya tawar Turki dan menjaga keamanan bagi warga negaranya.

Kedua, mengenai kepentingan kesejahteraan ekonomi dalam negeri. Yaitu dengan mengembangkan hubungan dengan negara lain atau tetangga. Kesejahteraan ekonomi dapat dicapai salah satu caranya dengan membangun relasi sebesar-besarnya dengan negara lain, terutama negara tetangga. Hal ini karena suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah Turki mendapatkan posisi karena aktif dalam usaha untuk menjalin hubungan dengan negara lain, hal selanjutnya yang Turki lakukan adalah dengan menciptakan atmosfer *economic interdependence* di sekitar kawasannya yaitu Timur Tengah. Jika tidak ada *interdependence* antar negara dalam pemenuhan kebutuhan, mustahil bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Ketiga yaitu, Turki berupaya untuk menjadi *bridge country* antara benua Eropa dan Asia serta pihak Barat. Dengan menjadi *bridge country*, Turki mencoba untuk menciptakan tatanan dunia yang teratur di wilayah Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan kepentingan Turki untuk menciptakan interaksi yang baik dengan negara tetangganya. Langkah penyebaran nilai demokrasi yang dipadukan dengan modernisasi, sekulerisme dan Islam yang dilakukan oleh Erdogan kepada Mesir, Suriah dan beberapa negara Afrika Utara memposisikan politik luar negeri Turki semakin strategis, bukan hanya di kalangan negara kawasan Timur Tengah tetapi juga pada negara-negara Barat.

Semangat untuk mengembalikan masa kejayaan Utsmani (Ottoman) memotivasi Turki memainkan manuver politik luar negerinya. Hasrat kuat Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa yang mayoritas merupakan negara maju menjadi salah satu agenda perjuangan politik, ditambah dengan pengesahannya sebagai bagian dari Uni Eropa belum juga terlaksana. Meskipun demikian, tidak membuat Turki menjadi negara 'pengemis'. Turki berani menentukan sikap mengancam akan membekukan kerjasama apapun dengan Uni Eropa.

Agresifitas politik luar negeri Turki tidak hanya berhenti pada agenda bergabung dalam Uni Eropa. Turki juga melakukan kerja politik lainnya guna

melakukan *balance of power*. Turki berusaha meyakinkan pada dunia internasional bahwa Turki adalah negara demokrasi sekaligus pejuang demokrasi. Seperti yang dilakukannya dalam memprakarsai menjadi aktor baru dalam perdamaian Palestina dan juga pada penegakkan pelanggaran nilai demokrasi seperti pada konflik politik di Mesir baik pada pelengseran Hosni Mubarak ataupun pada kudeta militer Mesir tahun 2013. Hal ini menjadikan Turki memiliki peluang yang sangat besar untuk menempati posisi penting di kawasan Timur Tengah sebagai “agresor” politik baru. Kepiawaian Turki memainkan politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dari peran para aktor politiknya. Turki berhasil mengkombinasikan hubungan *state actor* dan *non-state actor* dalam melancarkan strategi politik luar negerinya.

Menurut Ana Almuedo setidaknya terdapat 3 akibat utama demokratisasi Turki yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan luar negeri Turki.⁴⁷ Pertama, menurunnya peran militer Turki. Peran militer dalam kehidupan politik Turki pada dasarnya saling berkaitan dengan meningkatnya peran aktor-aktor politik lain dalam kontribusi membentuk karakter politik luar negeri Turki. Sejak AKP memimpin Turki, ia menggantikan pendekatan militer yang selama ini digunakan dalam menjalin hubungan diplomasi dengan dunia internasional dengan pendekatan diplomatis yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, semakin tingginya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam formulasi kebijakan politik luar negeri Turki. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang khususnya bergerak di bidang ekonomi dan investasi seperti SETA, TUBB dan TUSIAD. Organisasi-organisasi ini menempatkan stabilitas politik regional dalam agenda kompromi politiknya dengan Pemerintah Turki. Organisasi-organisasi tersebut merupakan kelompok kepentingan yang memiliki peran sentral dalam membuka pintu investasi Turki ke dalam pasar ekonomi Timur Tengah, yang selama ini kurang tereksplorasi akibat kondisi instabilitas politik yang berkelanjutan sehingga keadaan politik yang stabil akan memudahkan mereka dalam melakukan investasi. Tercatat pada tahun 2010,

⁴⁷ Ana Almuedo. 2011. "New Turkish Foreign Policy Towards Middle East." European Institute of the Mediterranean. Volume 4 dari *Papers IEMed*, September. Hal 6

jumlah persentase ekspor Turki ke wilayah Timur Tengah telah mencapai 21,5 persen dari total jumlah keseluruhan ekspor yang diikuti dengan penurunan sebesar 27% jumlah total ekspor ke wilayah Inggris dan Jerman.⁴⁸ Dengan besarnya kepentingan organisasi masyarakat sipil di wilayah Timur Tengah, logis kemudian bila dalam *Arab Spring* keterlibatan mereka menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan.

Secara tidak langsung, organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam membentuk karakteristik politik luar negeri Turki dengan mengisi kekosongan karakter politik luar negeri yang sebelumnya diisi oleh peran sentral militer. Karakteristik politik luar negeri Turki yang sebelumnya mengedepankan keamanan kawasan sebagai kepentingan utama, telah menempatkan kepentingan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Bentuk reluktansi Pemerintah Turki dalam keterlibatannya di *Arab Spring* khususnya di kawasan Timur Tengah seperti yang dipaparkan diatas, merupakan contoh bagaimana kepentingan ekonomi telah menjadi salah satu perhatian utama dengan adanya organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, meningkatnya peran opini publik Turki. Meningkatnya peran opini publik dalam kehidupan politik Turki secara tidak langsung membuat jabatan-jabatan strategis seperti Perdana Menteri atau menteri luar negeri memiliki pengaruh informal dan personal yang lebih besar. Proses peningkatan peran personal jabatan-jabatan strategis ini disebut sebagai “Presidensiliasi”⁴⁹ yaitu menempatkan popularitas Perdana Menteri atau jabatan lain dalam pelaksanaan politik luar negeri dengan mengambil porsi popularitas Presiden dan bahkan Kementerian Luar Negeri sendiri. Sebagai konsekuensinya, pendapat publik terhadap langkah yang diambil Perdana Menteri dengan demikian akan memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam peristiwa *Arab Spring*, opini publik Turki yang paling menunjukkan signifikansinya adalah ketika terjadi isu demokratisasi dan kudeta Mesir yang pertama dan kedua yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan 2013. Awalnya hubungan diplomatis antara Turki dengan Mesir membaik dan

⁴⁸ Henri J. Barkey.2011 "*Turkish Foreign Policy and Middle East.*" CERl Strategy Papers. Hal 5

⁴⁹ Lecha, Eduard Soler i. 2012. "*The Conceptual Architecture of Turkish Foreign Policy: An Update in Light of Regional Turbulence.*" CIDOB Documents. Hal: 3

menguat ketika terjadi proses demokratisasi yang pertama pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Saat itu terjadi peralihan kekuasaan di Mesir dari Pemerintahan Husni Mubarak yang sudah menduduki jabatan Presiden kurang lebih 30 tahun ke Muhammad Mursi yang berjalan melalui proses pemilu. Pemerintahan Turki mendukung penuh proses demokratisasi ini.

Pada pertengahan tahun 2013 terjadi lagi kerusuhan di Mesir. Kerusuhan tersebut lebih dikenal dengan gelombang revolusi ke dua. Gelombang revolusi ini di gerakkan oleh militer Mesir. Saat itu, terjadi ketegangan yang hebat antara Turki dan Mesir yang dikomando oleh Perdana Menteri Erdogan. Perdana Menteri Erdogan menolak keras gelombang revolusi ini karena menilai hal tersebut dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang sudah tertata rapi di tataran internasional dan khususnya yang baru mulai tumbuh dan berkembang di Mesir. Hal ini juga dapat merusak hubungan kerjasama antara Turki dan Mesir.

BAB III

KERJASAMA TURKI DENGAN MESIR Dan KUDETA MILITER MESIR

Suatu negara sama seperti individu. Ia butuh bersosialisasi dan bekerjasama untuk melangsungkan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama antar negara adalah suatu keniscayaan, terlebih letidak geografis dan potensi yang dimiliki antar negara berbeda-beda, baik dilihat dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya.

3.1 Kerja sama Turki-Mesir

Lokasi geografis yang berdekatan dan sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim menjadikan hubungan kerjasama antara Turki dan Mesir begitu dekat. Hal tersebut ditambah lagi dengan kesamaan sejarah dan budaya antara kedua negara menjadikan seolah-olah hubungan kerjasama adalah suatu keniscayaan. Selama kurang lebih lima abad (1517 M-1923 M), Mesir pernah menjadi bagian dari Turki di bawah Kekaisaran Ustmani yang dengan ibu kota di Konstantinopel.⁵⁰ Setelah kekaisaran Ustmani runtuh Turki menjalin kembali hubungan dengan Mesir yaitu pada tahun 1925 dengan status hubungan *charge d'affaires*.⁵¹ Dalam membangun kerangka kerja strategis, Turki dengan Mesir membangun kerjasama bilateral. Kerjasama Turki dengan Mesir meliputi bidang politik dan ekonomi.

3.1.1 Kerjasama Politik Turki-Mesir

Kerjasama politik Turki dengan Mesir mengalami penguatan dari hubungan *charge d'affaires* ke hubungan diplomatik pada tahun 1948. Sejak saat itu, pertukaran Duta Besar dilakukan. Kedua negara memiliki kantor kedutaan dan konsulat jenderal di masing-masing ibu kota negara. Pertukaran duta besar dilakukan untuk lebih mempererat dan mempermudah komunikasi antara dua

⁵⁰ Badri Yatim. 2006. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. edisi I. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 128.

⁵¹ Tim Redaksi. 2013. *Embassy History and Previous Ambassadors*.

<http://cairo.emb.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx> diakses pada tanggal 1 Desember 2014

negara, terlebih untuk menghindari kesalahpahaman ketika terjadi suatu persoalan atau masalah.

Kerjasama dalam bidang politik semakin kuat ketika Husni Mubarak lengser dari jabatan Presiden Mesir dan digantikan oleh Presiden Muhammad Mursi melalui pemilu pada tahun 2011. Tidak lama setelah Mursi terpilih sebagai Presiden Mesir, Abdullah Gul selaku Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 3 Maret 2011. Abdullah Gul adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Mesir pasca Revolusi Tahrir. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan dan berbagi inspirasi pada masa transisi untuk menuju sistem Pemerintahan yang lebih demokrasi.

Kunjungan berikutnya dilakukan oleh Perdana Menteri Turki Erdogan pada tanggal 13 September 2011. Pada kunjungan tersebut Perdana Menteri Erdogan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi stabilitas politik dan ekonomi Mesir. Ia mengajak 6 Menteri dan sekitar 200 pebisnis yang siap membantu Mesir baik dalam bentuk perdagangan, investasi dan keuangan untuk perekonomian Mesir.⁵² Setelah kunjungan Perdana Menteri Erdogan ke Mesir, Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa Turki siap menjadi aliansi strategis antara Mesir dan Turki yang ia sebut sebagai "*Axis of Democracy*".⁵³ Ahmet Davutoglu telah mengunjungi ibu kota Mesir sebanyak 5 kali sejak penggulingan Mubarak pada Februari 2011.⁵⁴

Pada bulan September 2012 Presiden Mursi melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki. Kunjungan tersebut adalah kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden Mursi setelah dilantik sebagai Presiden Mesir. Kunjungan tersebut memberikan sinyal positif bagi kedekatan Turki dengan Mesir setelah berkunjungnya pejabat inti Pemerintah Turki ke Mesir. Bersamaan dengan

⁵² Josephus primus. 2011. *Turki jabat Erat Mesir* diakses dari <http://internasional.kompas.com/> diakses pada tanggal 1 Desember 2014.

⁵³ T. Fouad, MD. 2011. *Egypt and Turkey, an Axis against Democracy?*. <http://democrati.net/2011/09/30/egypt-and-turkey-an-axis-against-democracy/> diakses pada tanggal 1 Desember 2014

⁵⁴ Tim Redaksi. 2011. *Turkey expects to team with Egypt*. Diakses dari http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/09/19/Turkey-expects-to-team-with-Egypt/48851316421000/ pada tanggal 4 Februari 2015.

kunjungan tersebut Presiden Mursi juga menghadiri acara konferensi AKP.⁵⁵ Pada bulan yang sama yaitu September 2012, tidak lama setelah kunjungan Presiden Mursi ke Turki, Kedutaan Turki di Kairo memberikan bantuan sebesar 2 miliar dollar yang ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa Mesir dan mendukung investasi di bidang infrastruktur.⁵⁶

Hubungan politik Turki dengan Mesir sangat kuat pasca revolusi pada tahun 2011. Turki mengharapkan Mesir akan menjadi kawan utama dalam menyebarkan dan memperjuangkan nilai demokrasi di kawasan Timur Tengah. Terlebih partai pemenang di Turki (AKP) dan Mesir (FJP) memiliki kedekatan hubungan secara ideologi, yaitu kelahiran partai yang dilatarbelakangi oleh semangat keislaman. Namun demikian, keharmonisan hubungan politik Turki dengan Mesir yang terjalin setelah revolusi Mesir 2011 tidak berlangsung lama. Satu tahun setelah terpilihnya Presiden Mursi, militer Mesir meng kudeta pemerintahan. Tindakan militer tersebut sangat berpengaruh pada hubungan Turki dengan Mesir. Kedua negara bersitegang, militer Mesir tidak menerima dengan pernyataan Pemerintah Turki bahwa tindakan yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk kudeta sedangkan Pemerintah Turki yang diwakili oleh Perdana Menteri Erdogan tetap bersikukuh bahwa tindakan tersebut adalah kudeta. Ketegangan yang semakin panas tersebut berakibat pada pemutusan hubungan diplomatik antar kedua negara. Mesir mengusir duta besar Turki yang sedang berada di Mesir, begitu juga Turki mengusir duta besar Mesir yang sedang berada di Turki. Kedua duta besar negara sama-sama mendapatkan *persona non grata*, yang berarti bahwa perwakilan negara di kedua negara tidak lagi ada.

3.1.3 Kerjasama Ekonomi Turki - Mesir

Kerjasama bidang ekonomi Turki dengan Mesir menjadi kekuatan pendorong dalam pengembangan hubungan kerjasama antara keduanya.

⁵⁵ Tim Redaksi. 2012. *Egypt's Morsi visits Turkey to strengthen emerging alliance*. Diakses dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/54291/Egypt/Politics-/Egypts-Morsi-visits-Turkey-to-strengthen-emerging-.aspx> pada tanggal 14 Maret 2015.

⁵⁶ Patrick Werr. 2012. *Turkey to provide Egypt with \$2 billion in finance*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2012/09/15/us-egypt-turkey-finance-idUSBRE88E0BQ20120915> pada tanggal 14 Maret 2015.

Kerjasama ekonomi Turki dengan Mesir pertama kali dimulai dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan pada tahun 1966 di Kairo, yang kedua di Ankara pada tahun 1976 dan yang ketiga di Kairo pada 4 Oktober 1996.

Kerjasama Turki dengan Mesir semakin kuat ketika partai AKP memenangkan pemilu di Turki pada tahun 2002. Perekonomian Turki mengalami kemajuan pesat di bawah nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pesatnya pertumbuhan ekspor Turki mendorong pemerintah untuk mencari pangsa pasar di Timur Tengah. Mesir adalah salah satu dari target pasar itu. Akhirnya Turki dan Mesir menjalin kerjasama pasar bebas *Free Trade Agreement (FTA)* yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2005 di Kairo dan mulai berlaku pada 1 Maret 2007.⁵⁷

Perjanjian Perdagangan Bebas antara Turki dan Mesir meliputi pengaturan di bidang tarif atas produk industri, penghapusan pembatasan kuantitatif, jasa, investasi dan ketentuan umum. Perjanjian bilateral lainnya adalah Nota Kesepahaman mengenai Kerjasama di Bidang Pariwisata. Perjanjian ini meningkatkan kepercayaan investor Turki terhadap perekonomian Mesir. Oleh karena itu, sebagian besar pengusaha Turki langsung menanamkan investasi usaha di Mesir.

Perdagangan Turki dengan Mesir meningkat dua setengah kali dalam tiga tahun sebagai akibat dari Perjanjian Perdagangan Bebas. Volume perdagangan Turki dan Mesir yang awalnya bernilai 1,1 miliar dolar pada tahun 2006, berubah menjadi 1,5 miliar dolar pada tahun 2007 dan 2,3 miliar dolar pada tahun 2008. Ekspor Mesir ke Turki pada tahun 2008 mencapai 943 juta dolar setara dengan 39% jika sebanding dengan tahun sebelumnya. Sementara ekspor Turki ke Mesir mencapai 1,4 miliar dolar dengan kenaikan 58 %. Ekspor Turki ke Mesir pada tahun 2009 mencapai 2,6. Volume perdagangan Turki dalam 11 bulan pertama tahun 2010 telah terealisasi 2,9 miliar dolar.⁵⁸ Setiap tahun ekspor Turki ke Mesir

⁵⁷ Tim Redaksi. 2013. *Free Trade Agreement between Egypt & Turkey*. Diakses dari <http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=1361#.VNHFoCyE5H0> pada tanggal 4 Februari 2015.

⁵⁸ Tim Redaksi. 2013. *Turkey-Egypt Economic and Trade Relations*. Diakses dari http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-egypt.en.mfa pada tanggal 3 Februari 2015.

terus mengalami peningkatan. Peningkatan nilai ekspor-impor dan volume penjualan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Peningkatan Ekspor-Import dan Volume Perdagangan Turki Mesir

Year	Export	Import	Trade Volume	Balance of Trade
2005	687.299	267.246	954.545	420.053
2006	709.353	392.501	1.101.854	316.852
2007	902.658	679.345	1.582.004	223.313
2008	1.426.060	942.507	2.368.567	483.553
2009	2.618.360	641.379	3.259.739	1.976.981
2010	2.261.286	926.280	3.187.566	1.335.006

Sumber: Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. 2013. *Turkey-Egypt Economic and Trade Relations*. Diakses dari http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-egypt.en.mfa pada tanggal 3 Februari 2015.

Produk baja, besi dan mineral adalah barang utama ekspor Turki ke Mesir. Barang utama yang lainnya yaitu; beras, berbagai jenis batubara, kawat tembaga, minyak bumi, pupuk kimia, barang tekstil dan pakaian jadi. Sebagian besar perusahaan Turki lebih memilih ibukota Kairo, Alexandria dan sekitarnya untuk dijadikan tujuan investasi. Hubungan investasi antara kedua negara terus berkembang dan memberikan pengaruh pada volume perdagangan positif.

Peningkatan hubungan antara kedua negara di bidang perdagangan, berpengaruh juga pada peningkatan jumlah wisatawan dari kedua negara. Sekitar 42 ribu wisatawan Mesir mengunjungi Turki pada tahun 2006 dan jumlah ini mencapai 53 ribu pada tahun 2007 dan 57 ribu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mesir dari Turki mencapai 67 ribu dengan peningkatan 15 % sebanding dengan tahun sebelumnya.

Hubungan Turki Mesir terbilang tidak mengalami gangguan yang berarti walaupun pada tahun 2011, Mesir mengalami revolusi kepemimpinan. Pada saat itu, respon Turki justru mendukung revolusi. Turki memberikan dukungan penuh

baik berupa politik, keuangan dan teknis sejak revolusi berlangsung pada tanggal 25 Januari 2011. Turki menilai revolusi pada tahun 2011 merupakan langkah baru Mesir untuk menjadi negara yang demokratis. Dengan berubahnya Mesir menjadi negara yang demokratis akan lebih menjanjikan bagi pertumbuhan perekonomian.

Pasca terjadi revolusi di Mesir, Turki memperkuat dasar hubungan Turki dengan Mesir melalui 41 dokumen hukum yang ditandatangani dalam kerangka Tingkat Tinggi *Strategis Cooperation Council* (HSCC) antara Turki dan Mesir. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua perwakilan negara mengadakan pertemuan pada bulan November 2012.⁵⁹ Dengan adanya pertemuan ini maka hubungan antara Turki dengan Mesir lebih harmonis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tidak dipungkiri perjanjian *Free Trade Area* telah berlaku antara kedua negara sejak tahun 2007.

Pasca terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir, hubungan Turki dengan Mesir semakin kuat. Turki berencana melakukan penguatan kerjasama dalam bidang investasi. Ahmet Davotuglo selaku Menteri luar negeri Turki mengatakan bahwa dalam tatanan negara demokrasi kekuatan ekonomi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Berikut adalah pernyataan Ahmet Davotuglo, “*For democracy, we need a strong economy*”.

Ahmet Davotuglo memprediksi bahwa investasi awal Turki di Mesir yang sebesar \$ 1,5 milyar akan menumbuhkan perekonomian Mesir sebesar \$ 5 miliar dalam waktu dua tahun. Total perdagangan meningkat menjadi \$ 5 miliar, dari jumlah awal yang sebesar \$ 3,5 miliar pada akhir 2012. Kemudian \$ 10 miliar pada 2015. Berikut pernyataan dari Ahmet Davotuglo:

*“Turkey’s \$1.5 billion investment in Egypt would grow to \$5 billion within two years and that total trade would increase to \$5 billion, from \$3.5 billion now, by the end of 2012, then \$10 billion by 2015”.*⁶⁰
(Investasi Turki di Mesir sebesar 1.5 miliar dolar akan tumbuh menjadi

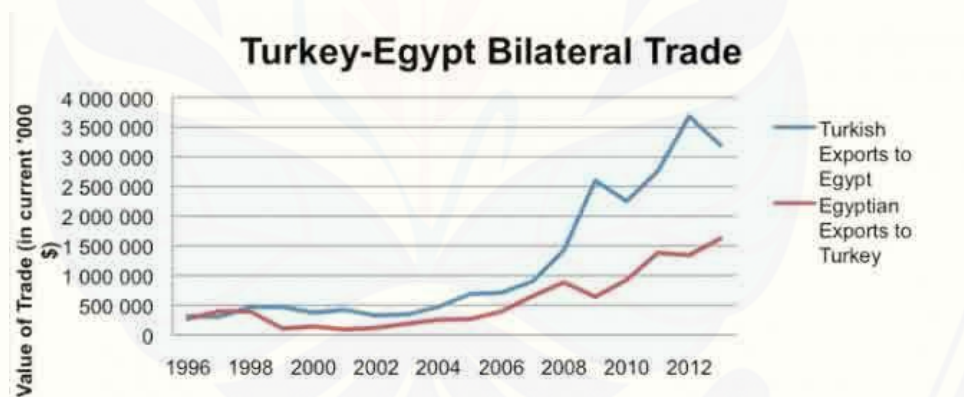
⁵⁹ Tim Redaksi. 2013. *Relations between Turkey–Egypt*. Diakses dari <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-egypt.en.mfa> diakses pada tanggal 1 Desember 2014

⁶⁰ Anthony Shadid. 2011. *Turkey Predicts Alliance With Egypt as Regional Anchors*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2011/09/19/world/middleeast/turkey-predicts-partnership-with-egypt-as-regional-anchors.html?pagewanted=all& r=0> pada tanggal 4 Februari 2015

5 miliar dolar dalam waktu dua tahun dan total perdagangan akan naik menjadi 5 miliar dolar, dari 3.5 miliar dolar diakhir tahun 2012, dan akan menjadi 10 miliar dolar pada tahun 2015).

Rencana Turki yang disampaikan Ahmet Davutoglu diatas menjadi kenyataan. Seperti yang disampaikan oleh Departemen ekonomi Turki Penguatan kerja sama Turki dengan Mesir ditunjukkan dengan semakin besarnya tingkat ekspor Turki. Ekspor barang Turki ke Mesir pada tahun 2012 adalah \$ 3,7 miliar, meningkat 33,3 % dari tahun 2011 (\$ 2,7 miliar). Barang-barang tersebut melingkupi produk minyak bumi (1.525 milyar \$), besi dan baja (\$ 536 juta), serat tekstil dan produk (\$ 264 juta), logam (\$ 131 juta), mesin listrik, alat dan peralatan (\$ 105 juta). Hal ini menjadikan surplus perdagangan barang Turki mengalami kenaikan senilai \$ 2,2 miliar pada 2012, meningkat 41% (\$ 1,3 miliar) tahun 2011.⁶¹ Berikut ini adalah data yang menggambarkan peningkatan perdagangan Turki dengan Mesir.

Tabel 2. Data Perdagangan Turki-Mesir



Sumber: Ministry of Economy. 2013. *Egypt*. Diakses dari <http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=38F8CD2A-E5A3-F61A-550A3A023E4B7756> pada tanggal 7 Februari 2015

Dukungan Turki terhadap revolusi pada tahun 2011 tidak bisa dilepaskan dari keinginan Turki untuk menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang demokratis dan sebagai pangsa pasar Turki. Setelah sekian lama

⁶¹ Ministry of Economy. 2013. *Egypt*. Diakses dari <http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=38F8CD2A-E5A3-F61A-550A3A023E4B7756> pada tanggal 7 Februari 2015

kepemimpinan kawasan Timur Tengah di dominasi oleh kekuatan yang berlatar belakang militer dan bersikap otoliter. Selain itu, Turki juga berkeinginan untuk memperkuat *bergaining position* sesuai dengan doktrin politik luar negerinya.

Namun demikian, keharmonisan kerjasama kedua negara tidak bertahan lama. Kericuhan politik kembali terjadi di Mesir. Kudeta militer Mesir berlangsung pada tanggal 3 Juli 2013 dan menyebabkan tersingkirnya Presiden Mohammad Mursi. Tidak seperti pada revolusi 2011 yang tidak membawa dampak buruk bagi hubungan Turki-Mesir. Kudeta pada tahun 2013 berdampak buruk bagi hubungan antara Turki dan Mesir. Turki berpandangan bahwa stabilitas pembangunan di Mesir hanya dapat dicapai dengan menghormati kehendak demokrasi rakyat. Sedangkan pada kudeta 2013, kehendak rakyat Mesir sudah tidak lagi indahkan.

3.2 Kepemimpinan Muhammad Mursi

Revolusi pada tahun 2011 membawa Mesir untuk menggelar pemilihan umum Presiden. Rakyat Mesir menginginkan ada perubahan dalam tataran kepemimpinan negara yang lebih demokratis. Pada bulan November 2011, pemilu diadakan di Mesir dalam keadaan damai. Pemilu ini berbeda jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini diikuti oleh berbagai macam partai, baik dari kubu nasionalis, sosialis maupun agamis yang terdiri dari 16 partai. Dalam penghitungan suara partai-partai berbasis Islam mendominasi perolehan suara. Partai kebebasan dan keadilan memperoleh 37 persen, sedangkan urutan kedua ditempati oleh partai al-Nour dengan suara 24 persen. Sedangkan dalam pemilihan Presiden ada 13 kandidat yang dicalonkan, yaitu Ahmed Shafik (*independent*), Khaled Ali (*independent*), Mohammad Salim Al-Awa (*independent*), Hisham Bastawisy (*Tagammu*), Abu Al-Izz Al-Hariri (*Socialist Popular Alliance Party*), Muhammad Mursi (*Freedom and Justice Party*), Amr Moussa (*independent*), Hamdeen Sabahi (*Dignity Party*), Abdel Moneim Aboul Fotouh (*Al-Nour Party, moderate Islamic Al-Wasat Party, Egyptian Current*

Party), Abdulla Alashaal (*Authenticity Party*), Mahmoud Houssam (*independent*), dan Houssam Khairallah (*Democratic Peace Party*).⁶²

Setelah proses pemilihan umum selesai dilakukan, Muhammad Mursi dinyatakan sebagai pemenang yang diusung dari partai berbasis Islam, *Freedom and Justice Party* (FJP), Partai Kebebasan dan Keadilan. Pemilu tersebut merupakan pemilu paling demokratis selama sejarah berdirinya negara Mesir. Pada pemilu tersebut, Muhammad Mursi mendapatkan perolehan suara sebanyak 51,73 persen setelah mengalahkan Ahmad Shafiq selaku mantan Perdana Menteri Mesir di era Husni Mubarak.

Muhammad Mursi akhirnya terpilih sebagai Presiden Mesir menggantikan Presiden Husni Mubarak sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Presiden Mesir. Muhammad Mursi secara resmi dilantik sebagai Presiden pada tanggal 30 Juni 2012. Dengan begitu secara resmi pula ia menjadi Presiden kelima Mesir. Ia adalah Presiden pertama Mesir dari kalangan sipil yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Pada era kepemimpinan Muhammad Mursi, kebijakan Mesir mengalami banyak perubahan. Tidak hanya bergeser dari kepemimpinan militer ke kepemimpinan sipil, tetapi Mesir juga merumuskan kebijakan baru dalam pertarungan geopolitik kawasan Timur Tengah. Hal ini tampak dari pidato politik pertama Mursi sebagai Presiden di Universitas Kairo. Dalam pidato tersebut, secara tersirat Mursi menyinggung kepada tiga pihak. Pertama, kepada Dewan Agung Militer (SCAF). Ia menegaskan bahwa Mesir hari ini tidaklah sama dengan Mesir pada masa-masa sebelumnya. Hari ini, rakyat Mesir adalah pemilik kekuasaan sesungguhnya. Berikut pernyataan Muhammad Mursi, “...*no institution will be above the people*”⁶³ (tidak ada lembaga kecuali atas kehendak rakyat). Kedua, kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa Mesir adalah negara

⁶² Thomas Plofchan.2012. *Candidates in the 2012 Egyptian Presidential Election*. Diakses dari <http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Pages/articleDetails.aspx?aid=162> pada tanggal 15 Maret 2015.

⁶³ Al Jazeera. 2012. *Egypt's Morsi defies military in fiery speech*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/06/201262916347287161.html> pada tanggal 15 Maret 2015

merdeka dan independen. Ketiga, kepada Israel. Ia mendesak Israel untuk menghentikan pendudukannya atas wilayah Palestina.

Kebijakan yang dirumuskan oleh Muhammad Mursi tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat, meskipun SCAF baru memegang tampuk kekuasaan selama 16 bulan sejak revolusi tahun 2011, tetapi sesungguhnya militer telah memiliki pengaruh kuat di Mesir sejak republik Mesir diproklamirkan pada tanggal 18 Juni 1953. Sepanjang sejarahnya, seluruh Presiden Mesir sebelum Mursi adalah perwira militer. Peralihan dari satu Presiden ke Presiden lain sangat ditentukan oleh keputusan politik militer. Militer Mesir selalu memiliki tradisi untuk berkuasa.

Dua bulan setelah pelantikan Muhammad Mursi, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2012 Presiden Mursi mengeluarkan kebijakan untuk mengamandemen konstitusi yang menyerahkan kekuasaan besar pada militer dan mengganti pimpinan militer yang telah menggulingkan Husni Mubarak. Dengan diamandemen konstitusi tersebut berarti merubah peran militer Mesir dari yang sebelumnya mempunyai kekuasaan dalam mengontrol peran Negara menjadi aparat pengaman biasa.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh Mursi yaitu menerbitkan dekrit Presiden yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan melindungi revolusi 2011. Poin dari dekrit Presiden tersebut yaitu;

1. Mengulangi investigasi dan mengadili terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pembunuhan para demonstran revolusi 2011.
2. Undang-undang serta keputusan Presiden mulai tanggal 30 November 2012 hingga berlakunya konstitusi dan pemilihan parlemen baru bersifat valid dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Jaksa agung diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan 4 tahun dan usianya tidak kurang dari 40 tahun.
4. Perumusan rancang undang-undang konstitusi baru memiliki masa maksimal 6 bulan
5. Tidak diperkenankan bagi Yudikatif untuk membubarkan MPR dan dewan perumus konstitusi.

6. Presiden diperkenankan untuk mengambil langkah tegas jika disinyalir ada pihak yang melakukan tindakan yang mengancam revolusi 2011.
7. Pencopotan Jaksa Agung, memerintahkan pengadilan ulang kepada kroni-kroni Mubarak yang terlibat pembunuhan demonstran pada 25 Januari 2011, dan menghalangi Dewan Konstituante dan Majelis Syuro dalam usaha pembubaran.

Namun, beberapa pihak tidak menyetujui dekrit yang dikeluarkan ini. Pihak yang merasa dirugikan melakukan aksi turun jalan. Karena terdapat tekanan yang sangat besar maka Presiden Mursi akhirnya mencabut dekrit pada tanggal 8 Desember 2012.

Selepas dekrit Presiden dicabut, suasana perpolitikan Mesir masih mengalami ketegangan. Sebelum dekrit dicabut, Pemerintah Mursi berencana mengesahkan draft konstitusi baru yang diharapkan mampu menstabilkan keadaan Mesir. Supaya bisa mengetahui suara publik dan sebagai sarana langkah dalam menentukan pilihan dalam sebuah negara demokrasi maka Pemerintah Mesir melaksanakan referendum. Referendum ini bertujuan untuk menentukan persetujuan adanya konstitusi baru akan tetap digelar. Akhirnya Referendum dilaksanakan dengan dua putaran, yaitu pada tanggal 15 dan pada tanggal 22 Desember 2012.⁶⁴ Dalam referendum ini pemilih diberi pilihan apakah mereka menyetujui rancangan konstitusi yang disetujui oleh Majelis Konstituante Mesir pada tanggal 30 November 2012 atau tidak. Hasil dari referendum tersebut akhirnya menyetujui tetap dilaksanakannya konstitusi baru yang akan dirancang oleh Pemerintahan Mursi. Komisi referendum konstitusi Mesir mengumumkan hasil perolehannya sebagai berikut⁶⁵:

⁶⁴ Al Arabiya with AFP. 2012. *Egypt to hold referendum in two stages due to shortage of judges*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/articles/2012/12/11/254547.html> pada tanggal 7 Februari 2015

⁶⁵ Tim Redaksi. 2013. *Egypt's constitution passes with 63.8 percent approval rate*. Diakses dari <http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate> pada tanggal 7 Februari 2015

Tabel 3. Hasil Referendum Konstitusi 2012

Hasil Referendum Konstitusional 2012		
Ya atau tidak	Suara	Persentase
Ya	10,693,911	63.8%
Tidak	6,061,101	36.2%
Suara Sah	16,755,012	98.2%
Suara tidak sah atau kosong	303,395	1.8%
Total Suara	17,058,317	100.00%
Pemilih	32.9%	
Para Pemilih	51,919,067	

Sumber: Tim Redaksi. 2013. *Egypt's constitution passes with 63.8 percent approval rate*. Diakses dari <http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate> pada tanggal 7 Februari 2015

Dari data diatas dapat dilihat bahwa suara terbanyak dari masyarakat yaitu setuju dengan konstitusi baru. Dengan hasil referendum tersebut maka Mesir menyepakati dilaksanakannya konstitusi baru. Konstitusi baru bisa lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi rakyat Mesir. Konstitusi baru tersebut berisikan hal-hal yang sangat fundamental bagi sistem politik Mesir, seperti menghindari terjadinya diktatorisme, dimana masa jabatan Presiden dibatasi maksimal dua periode, satu periode selama empat tahun.

Kebijakan-kebijakan dan sikap politik yang dilakukan oleh Mursi menjadi refleksi bahwa Mursi tidak hanya berniat memperkuat kepemimpinan sipil, melalui upaya Mursi menyingkirkan pengaruh militer dalam panggung politik. Tetapi juga mengembalikan Mesir menjadi kekuatan paling berpengaruh di Timur Tengah. Selama kepemimpinan Mursi, ada kubu yang mendukung dan ada juga kubu yang menolak kebijakan Mursi. Kubu yang menolak mereka menyebut dirinya sebagai kubu oposisi yang dipelopori oleh kalangan Koptik. Mereka

menilai bahwa kebijakan Mursi tidak adil dan akan mengabaikan hak-hak kaum minoritas. Mereka menuntut agar Mursi mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Massa anti Mursi berkumpul di lapangan Tahrir. Dalam aksi penolakan Mursi ini ada sesuatu yang janggal. Menurut organisasi *Human Rights Watch* di Mesir, dalam aksi ini terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Kurang lebih sebanyak 91 wanita diperkosa dan beberapa dari mereka diperkosa secara massal pada tanggal 30 Juni 2013⁶⁶. Tingkat kriminalitas yang sangat tinggi ini dipicu tidak adanya/minimnya polisi yang berjaga di sekitar lokasi aksi.

Sedangkan massa pendukung Mursi berpusat di bundaran masjid Rabiah Adawiyah, Kairo Timur. Dalam aksi ini massa meneriakkan kata “Mursi pahlawan kami, Badie penuntun kami.” Sementara itu, televisi nasional dan televisi asing dilarang pihak militer untuk menyiarkan unjuk rasa ini. Televisi yang dianggap menyokong ataupun menyiarkan aksi pendukung Mursi, yaitu *Misr25*, *Al Jazeera* tidak hanya dilarang, tetapi juga ditutup. Begitu juga dengan *Al-HafizTV* dan *al-NasTV* bernasib serupa, menghilang dari udara.⁶⁷

3.3 Kudeta Militer Mesir 2013

Kudeta militer Mesir terhadap Presiden Mursi tahun 2013 merupakan ‘kerusuhan’ politik yang terjadi setelah revolusi Mesir 2011. Ada keunikan tersendiri pada kudeta tersebut. Pemerintah yang dikudeta adalah Pemerintah hasil pemilu demokratis pertama dalam sejarah Pemerintahan Mesir. Kudeta tersebut dilakukan oleh Militer Mesir ketika Pemerintahan Mursi baru berumur satu tahun. Tahun pertama dari masa jabatan Presiden Mesir yang seharusnya berakhir setelah 4 tahun kepemimpinan. Jeda waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan masa berkuasanya Husni Mubarak memimpin Mesir selama kurang lebih 30 tahun.

⁶⁶ Yanuardi Syukur. 2013. *Presiden Mursi, kisah ketidakutan dunia pada kekuatan Ikhwanul Muslimin*. Yogyakarta: Penerbit Hayyun Media. Hal. 96

⁶⁷ Aljazeera. 2013. *Egypt's military shuts down news channels*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/2013740531685326.html> pada tanggal 7 Februari 2015

Kudeta militer Mesir pada tahun 2013 berawal dari kebijakan-kebijakan Presiden Mursi yang berusaha untuk meminimalisir peran atau keterlibatan militer Mesir pada pemerintahan dengan mengamandemen konstitusi yang berkaitan dengan militer. Usulan perubahan konstitusi tersebut yaitu merubah peran militer yang sebelumnya mempunyai kekuasaan mengontrol negara menjadi aparat keamanan biasa. Selain itu, pemerintahan Mursi terlihat berusaha memperkuat peran Presiden (dirinya) dengan cara mengeluarkan dekrit Presiden. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mursi tidak berjalan lurus, tetapi menimbulkan pertentangan di kalangan rakyat. Demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh rakyat Mesir baik oleh mereka yang mendukung ataupun yang menentang kebijakan Mursi. Ketegangan dan kerusuhan yang mengakibatkan jatuh korban tidak terhindarkan. Korban yang menderita luka-luka ataupun tewas semakin hari semakin bertambah banyak.

Melihat kondisi di Mesir, maka militer Mesir mengultimatum kepada pemerintahan Mursi untuk segera berembuk dengan kubu oposisi pada 1 Juli 2013. Mereka memberikan jeda waktu 48 jam untuk berkompromi. Dalam proses kompromi tersebut, Mursi harus “merangkul” semua pihak untuk berpartisipasi, mulai dari faksi dan partai nasional, hingga organisasi pemuda. Jika tidak, militer bisa melakukan tindakan untuk ‘menyelamatkan’ negara. Undangan Mursi untuk mengadakan pertemuan dengan pihak oposisi sebenarnya sudah pernah dilakukan pada bulan Februari 2013.⁶⁸ Namun demikian, undangan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari kalangan oposisi. Kalangan oposisi lebih tetap memilih untuk berada di luar Pemerintahan (oposisi). Begitu juga ketika militer mengultimatum Mursi pada tanggal 1 Juli 2013, oposisi tetap tidak bersedia untuk duduk bersama dalam merumuskan kondisi Mesir ke depan. Hal tersebut berakibat pada kondisi Mesir yang semakin kacau.

Menanggapi ultimatum militer yang terus mendesak Presiden Mursi untuk mundur dari jabatannya, Presiden Mursi menyatakan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya. Hal tersebut karena dirinya terpilih secara sah melalui pemilu

⁶⁸ Reuters. 2013. *Egypt's Morsi invites opposition to dialogue on elections*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/latest-news_egypts-morsi-invites-opposition-to-dialogue-on-elections_308046.html pada tanggal 7 Februari 2015

langsung dan ia akan mempertahankan posisinya. Pernyataan tersebut juga sebagai tanggapan dari pernyataan militer yang akan membubarkan parlemen, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu Presiden jika Presiden Mursi tidak mencapai kesepakatan dengan para oposisi anti Pemerintah.⁶⁹

Pada tanggal 3 Juli 2013 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Mesir. Pada hari itu, Jenderal Abdel Fattah Al Sisi yang menjabat sebagai pemimpin militer Mesir mencopot jabatan Presiden Muhammad Mursi yang terpilih dalam pemilu 2012. Jenderal Al-Sisi memberikan pernyataan di stasiun televisi bahwa Presiden Mursi telah dicopot dari jabatannya dan konstitusi ditangguhkan. Militer Mesir kemudian menunjuk Adly Mansour yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi pemimpin sementara Mesir. Tindakan yang dilakukan oleh pihak militer ini mencitrakan bahwa militer adalah golongan nasionalis utama. Militer mengidentifikasi diri sebagai negara, apa yang dianggap baik oleh militer adalah baik juga untuk negara.⁷⁰

Salah satu kesuksesan penggulingan Mursi tidak bisa dilepaskan dari peran media. Media massa di Mesir dikuasai oleh militer, sedangkan media yang mendukung Mursi ditutup di bawah ancaman militer. Media yang sudah berada dalam kendali militer terus memutar tayangan keburukan Mursi dan aksi demonstrasi yang menolak kepemimpinan Mursi. Warga Mesir digiring pada opini bahwa Mursi telah kehilangan legitimasi dari rakyat.

Setelah peristiwa kudeta terhadap Mursi, maka Mursi langsung ditahan oleh militer Mesir dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pihak militer berpandangan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah Mursi dalam menggerakkan pendukungnya untuk melakukan perlawanan atau melindungi legitimasinya sebagai Presiden Mesir. Selain menahan Mursi, militer Mesir juga

⁶⁹ Aljazeera. 2013. *Egypt's Morsi says he will not step down*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/20137222343142718.html> pada tanggal 7 Februari 2015

⁷⁰ Eric A. Nordlinger. 1994. *Militer dalam politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Terjemahan oleh Drs. Sahat Simamora. Hal 94.

menahan beberapa tokoh partai pengusung Mursi seperti, Saad al-Katani, Gamal Gibril, Mohammed al-Beltagui.⁷¹

Penggulingan terhadap Presiden Mursi membuat keadaan Mesir tidak aman. Tindakan represif terjadi dimana-mana, terlebih di daerah demonstran baik di kawasan pendukung ataupun penentang Pemerintahan Mursi. Pada tanggal 7 Juli 2013, 13 orang dilaporkan tewas dalam kekerasan-kekerasan yang terjadi sejak penggulingan Mursi. Keadaan Mesir semakin memburuk ketika militer mulai menggunakan cara represif dalam menghadapi demonstrasi para pendukung Mursi. Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013, menteri kesehatan melaporkan bahwa sebanyak 42 orang tewas dan 300 orang luka-luka setelah terjadi bentrokan antara massa pendukung Mursi dengan militer di luar markas Garda Republik Kairo.⁷²

Walaupun Pemerintahan Mursi telah digulingkan tetapi massa pendukung Mursi tetap menggelar aksi demonstrasi. Mereka berkumpul di lapangan masjid Rabiah al Adawiyah, Kota Nasr, Kairo. Sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan Mursi yang tidak akan menyerah dan akan terus melawan penggulingan dirinya yang sejatinya telah melanggar hasil demokrasi yang sah. Tetapi hal yang sangat mengecewakan dilakukan oleh militer. Militer tidak menjaga kestabilan dan kedamaian dari aksi tersebut. Tetapi menggunakan cara-cara represif untuk membubarkannya.

⁷¹ Martin Chulov. 2013. *Egypt's military arrest Muslim Brotherhood supreme leader*. Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/04/egypt-military-arrest-warrants-Muslim-brotherhood> pada tanggal 7 Februari 2015

⁷² Tim Redaksi. 2013. *Massacre in Cairo deepens Egypt crisis*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/20137821320932698.html> pada tanggal 7 Februari 2015

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP KUDETA MESIR 2013

Sebelum AKP Turki memenangkan pemilu pada tahun 2002, Turki merupakan negara yang sangat akrab dengan kudeta. Kudeta pernah terjadi empat kali di Turki dihitung sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1924. Selama itu, nilai demokrasi kurang bisa diterapkan di Turki. Keterlibatan militer dalam Pemerintahan Turki tidak jauh berbeda dengan Mesir, peran militer begitu kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara internal ataupun eksternal. Militer adalah penjaganya. Semua keputusan Pemerintah harus selaras dengan keinginan dan kepentingan militer.

Sebelum mengkaji dan memahami lebih jauh faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan Pemerintah Turki terhadap kudeta militer Mesir tahun 2013, sesuai dengan kerangka konseptual yang penulis gunakan, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang persepsi Pemerintah Turki terhadap kudeta Mesir, kemudian pilihan sikap pemerintah Turki yang menyertai dalam merespon hal tersebut.

4.1 Persepsi AKP Terhadap Kudeta Mesir

Persepsi Pemerintah Turki di bawah AKP terhadap kudeta militer Mesir 2013 tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit yang pernah dialami Turki pada masa lalu. Partai berbasis Islam pernah beberapa kali dibubarkan dan pernah juga memenangkan pemilu di Turki tetapi muncul penolakan dan tidak berpihakan militer pada Pemerintah yang akhirnya berujung kudeta. Walaupun dalam konstitusi dan pernyataan pimpinan AKP menyatakan bahwa AKP bukan partai yang berbasis pada agama. Namun demikian, peristiwa sejarah tersebut sangat membekas pada masyarakat Turki, terlebih pada orang yang terlibat dalam politik saat itu. AKP menilai intervensi militer dalam pemerintahan bisa menghambat dan berpeluang menumbangkan demokrasi. Terhambatnya demokrasi dalam suatu negara akan berpengaruh juga pada kesejahteraan dan kepuasan warga negara.

Demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini sangat diandalkan di berbagai negara dunia. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sifat demokrasi itu sendiri. Aturan yang dijunjung dalam sistem demokrasi yaitu semua keputusan harus diserahkan pada rakyat. Artinya demokrasi merupakan sistem dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat yang paling menentukan ke arah mana Pemerintahan akan berjalan. Walaupun semua keputusan diserahkan pada rakyat namun demikian semua itu harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Seperti pemilu, yang prosesnya memutuskan siapa yang berhak atas jabatan pimpinan.

Awal kemenangan AKP di Turki pada tahun 2002 membawa komitmen Pemerintah Turki untuk mengembangkan dan menerapkan nilai demokrasi di Turki. Banyak kebijakan Turki yang berubah menjadi lebih demokratis. Dari perubahan tersebut Turki bertekad untuk menjadi pelopor dan penegak demokrasi di dunia terlebih di lingkup kewasannya. Dalam kasus kudeta militer Mesir, Turki melihat proses pemilihan dan diangkatnya Mursi sebagai Presiden di Mesir sudah sesuai dengan jalannya mekanisme demokrasi. Rakyat sudah dilibatkan sepenuhnya dalam proses tersebut.⁷³ Bahkan ketika menghadapi polemik diantara elit politik, Presiden Mursi juga mengembalikan keputusan ke tangan rakyat. Seperti yang terjadi pada dekrit Presiden pertama Mursi, ketika muncul pertentangan dari rakyat, Mursi segera mencabut dekrit itu dan melakukan referendum.⁷⁴ Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti pilihan rakyat, mana yang lebih mendapat dukungan dan mana yang tidak. Hasilnya adalah suara terbanyak dari pemilih menyatakan dukungannya terhadap konstitusi baru.

Namun demikian, pihak oposisi menyatakan menolak referendum.⁷⁵ Referendum yang dilakukan tidak diikuti oleh semua warga negara Mesir. Hanya

⁷³ Tim Redaksi. 2013. *Turkey's Erdoğan: We are not obsessed with Morsi*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/latest-news_turkeys-erdogan-we-are-not-obsessed-with-morsi_321156.html pada tanggal 2 Juli 2015

⁷⁴ Tim Redaksi. 2012. *Morsi calls referendum on new constitution*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/20121214293440143.html> pada tanggal 2 Juli 2015

⁷⁵ Alistair Lyon and Tamim Elyan. 2012. *Egypt's opposition rejects constitutional referendum*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2012/12/09/us-egypt-politics-idUSBRE8B30GP20121209> pada tanggal 2 Juli 2015

32,9% yang berpartisipasi dari keseluruhan warga Mesir.⁷⁶ Turki menilai pendapat seperti ini merupakan ketidaklogisan dalam berpikir. Dalam sistem demokrasi tidak ada pilihan netral/golput. Hasil penilaian didasarkan pada suara yang masuk, bukan pada yang tidak memilih. Seperti inilah sistem demokrasi itu berjalan dan ditetapkan.

Langkah yang juga dilakukan oleh Presiden Mursi adalah mengurangi peran militer dalam Pemerintahan.⁷⁷ Kebijakan ini juga tidak muncul dengan sendirinya. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Mursi dengan melihat *track record* militer di Mesir, dan juga untuk mengamankan cita-cita revolusi 2011. Kebijakan ini juga sudah ditetapkan.

Melihat langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Mursi, Turki menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh militer Mesir pada awal Juli 2013 walaupun dengan alasan menjaga kestabilan Mesir adalah langkah yang *inkonstitusional* sehingga pantas disebut sebagai kudeta militer.⁷⁸ Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Erdogan menyatakan bahwa:

“Kudeta itu jahat. Kudeta mengorbankan rakyat, masa depan, dan demokrasi. Saya ingin ini diungkapkan oleh semua orang dengan keberanian. Saya terkejut dengan sikap Barat. Parlemen Eropa mengabaikan nilai-nilainya sendiri dengan tidak menyebut intervensi militer di Mesir sebagai kudeta”.⁷⁹

Disamping itu, Perdana Menteri Erdogan menyatakan menentang dan tidak akan menghormati pemerintahan hasil kudeta militer. Berikut pernyataan dari Perdana Menteri Erdogan:

“Turkey is not against the Egyptian people but against the coup leaders. I will never respect those who come to power through military

⁷⁶ Tim Redaksi. 2012. *Egypt's constitution passes with 63.8 percent approval rate*. Diakses dari <http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate> pada tanggal 2 Juli 2015

⁷⁷ David D. Kikpatrick. 2013. *Army Ousts Egypt's President; Morsi Is Taken Into Military Custody*. Diakses dari http://www.nytimes.com/2013/07/04/world/middleeast/egypt.html?_r=0 pada tanggal 2 Juli 2015

⁷⁸ Ozan Varol. 2013. *Egypt's Non-Democratic Coup d'État and Turkey's Response*. Diakses dari <http://journal.georgetown.edu/egypts-non-democratic-coup-detat-and-turkeys-response-by-ozan-varol/> pada tanggal 2 Juli 2015

⁷⁹ Dorian Jones. Op. cit

coups".⁸⁰ (Turki tidak melawan rakyat Mesir tetapi melawan para pemimpin kudeta. Aku tidak akan pernah menghormati orang-orang yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta militer).

"Those who rely on the guns in their hands, those who rely on the power of the media cannot build democracy.... Democracy can only be built at ballot box".⁸¹ (Mereka yang mengandalkan senjata di tangan mereka, mereka yang mengandalkan kekuatan media tidak bisa membangun demokrasi Demokrasi hanya bisa dibangun di kotak suara).

Kudeta militer Mesir dapat merusak amanah revolusi 2011 dan berpeluang mengembalikan Mesir pada masa lalu dimana nilai demokrasi ditekan dan dibatasi. Turki tidak memungkiri adanya kubu pro dan kontra selama setahun sejak Mursi menjabat Presiden, yang disesalkan adalah sikap militer yang cenderung memihak pada salah satu kubu. Seharusnya dalam menghadapi polemik ataupun konflik, militer harus bisa mengambil sikap di tengah, netral, tidak memihak manapun dan mengusahakan adanya negosiasi bersama untuk mewujudkan Pemerintahan yang stabil. Dari sikap yang ditunjukkan oleh militer terlihat seolah-olah militer sangat berambisi untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Mursi.

Kudeta Militer Mesir 2013 terkesan didorong keinginan untuk menghancurkan dan membatasi aspirasi dari kelompok ataupun partai politik, artinya dilakukan tanpa mengindahkan nilai demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari penahanan Mursi dan pejabat-pejabat penting dari partai pemenang pemilu 2012 yaitu partai FJP, pasca pengumuman penurunan Presiden Mursi. Penahanan tersebut bertujuan agar rakyat tidak terpengaruh dengan alasan pembelaan dari tokoh-tokoh pendukung Mursi. Kalau memang yang dilakukan militer atas nama rakyat Mesir, tentunya tidak akan ada lagi kekuatiran bahwa rakyat akan dimobilisasi ulang untuk berbalik mendukung Mursi. Dari beberapa pernyataan

⁸⁰ Tim Redaksi. 2013. *Erdogan retaliates and raises Adawiya four fingers symbol*. Diakses dari <https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/8485-erdogan-retaliates-and-raises-adawiya-four-fingers-symbo> pada tanggal 2 Juli 2015

⁸¹ Tim Redaksi. 2013. *Turkey PM blasts Egypt 'coup' as enemy of democracy*. Diakses dari <http://www.ynetnews.com/articles/0.7340.L-4401290.00.html> pada tanggal 2 Juli 2015

Perdana Menteri Erdogan di atas, penulis memahami bahwa secara tidak langsung Perdana Menteri Erdogan mendorong kepada pendukung Presiden Mursi untuk tidak menyerah dalam mempertahankan status Presiden Mursi, karena dengan alasan apapun Presiden Mursi adalah Presiden yang sah dan telah terpilih secara demokratis.

4.2 Keputusan Pemerintah Turki Menolak Kudeta Mesir

Pada dasarnya kudeta adalah sesuatu yang inkonstitusional dan tidak bisa diterima oleh Turki atau bahkan oleh Pemerintah manapun. Sikap tersebut tetap dipegang oleh Turki dalam menanggapi kudeta Mesir 2013. Perdana Menteri Erdogan dan ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu mengumumkan menolak dan mengecam kudeta militer yang terjadi di Mesir. Ia mengatidakan bahwa:

“Leaders who come to power with open and transparent elections reflecting the will of the people can only be removed by elections, that is, the will of the nation. It is unacceptable for a government that has come to power through democratic elections to be toppled through illicit means and, even more, a military coup”.⁸² (Pemimpin yang berkuasa dengan pemilihan terbuka dan transparan yang mencerminkan kehendak rakyat hanya bisa digulingkan dengan pemilu, yaitu kehendak bangsa. Hal ini tidak dapat diterima bagi Pemerintah yang telah berkuasa melalui pemilu demokratis untuk menggulingkan melalui cara-cara ilegal dan, bahkan lebih, kudeta militer).

Beberapa hari setelah pernyataan penolakan Turki tersebut, EL Baredai menghubungi Perdana Menteri Erdogan untuk mengajak melakukan pertemuan membahas respon Turki terhadap apa yang terjadi di Mesir. Menanggapi hal tersebut Perdana Menteri Erdogan menolak dan tidak bersedia untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat negara yang berkuasa tanpa pemilu. Berikut pernyataan Perdana Menteri Erdogan:

“Currently, my President in Egypt is Morsi because he was elected by the people. You had 1.5 percent of the votes in the elections, Morsi

⁸² Tim Redaksi. 2013. *Turkey Calls Morsi's Removal 'Unacceptable Coup'*. Diakses dari <http://www.voanews.com/content/turkey-morsi-reaction/1695408.html> pada tanggal 16 Februari 2015.

had 52 percent".⁸³ (Saat ini, Presiden yang saya akui di Mesir adalah Mursi, karena ia dipilih oleh rakyat. Anda hanya memperoleh 1,5 persen suara dalam pemilu, sedangkan Mursi memperoleh 52 persen suara).

Pemerintah Turki dalam menolak kudeta Mesir juga mengajak negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya untuk ikut menolak dan menentang kudeta militer Mesir. Seperti yang dilakukan oleh menteri Turki urusan Uni Eropa yaitu Bagis. Bagis bersama Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu, melakukan pembicaraan dengan sejumlah politikus asing yang diantaranya terdiri dari Menteri Lithuania Urusan Uni Eropa, Linas Linkevicius; Menteri Luar Negeri Swedia, Carl Bildt; dan Ketua Parlemen Eropa, Martin Schulz; Komisaris Uni Eropa bagi Perluasan, Stefan Fule; Menteri Pertahanan Yunani, Dimitris Avramopoulos; dan menteri dari Qatar, Prancis, Norwegia, Swedia, Marokko, serta Brasil.⁸⁴ Ahmet Davutoglu selaku Menteri Luar Negeri Turki mengatakan:

“Kami mengharapkan Dunia menggambarkan apa yang telah terjadi di Mesir ini sebagai Kudeta, dan kudeta militer tidak bisa diterima, baik di Mesir atau di tempat lain”.⁸⁵

4.3 Faktor-Faktor Pertimbangan Pilihan

Menanggapi kudeta militer Mesir tahun 2013, Pemerintah Turki berhadapan dengan dua pilihan, yaitu mendukung atau menolak (menentang) kudeta. Dalam menentukan pilihan tersebut harus didasarkan pada keuntungan ataupun kerugian yang akan ditimbulkan. Menurut teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini, yaitu teori pengambilan keputusan Richard C. Snyder, suatu pilihan yang diambil dapat dianalisis dari faktor internal dan eksternal. Dua faktor inilah yang menjadi pertimbangan Pemerintah Turki dalam memutuskan sikap menolak kudeta militer Mesir.

⁸³ Mada Masr. 2013. *Erdogan refuses to meet ElBaradei*. Diakses dari <http://www.madamasr.com/news/erdogan-refuses-meet-elbaradei> pada tanggal 6 Februari 2015.

⁸⁴ Didi Purwadi. 2013. *Turki Kecam Sikap Eropa Yang Tidak Berani Sebut 'Kudeta Mesir'*. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah> diakses pada tanggal 14 Desember 2014

⁸⁵ Ibid

4.3.1 Faktor pertimbangan internal Pemerintah Turki

Faktor pertimbangan internal berasal dari keadaan dalam negeri Turki, baik dari segi pemerintahan, situasi politik dalam negeri ataupun sikap yang ditunjukkan oleh warga negara. Faktor pertimbangan internal dan turunannya yaitu:

- a. Kedekatan hubungan antara *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) dengan Ikhwanul Muslimin Mesir

Penolakan kudeta militer Mesir tahun 2013 oleh Turki tidak bisa dilepaskan dari kedekatan hubungan antara AKP dengan partai pemenang pemilu di Mesir yaitu *Freedom and Justice Parti* (FJP). Kedua partai ini sama-sama lahir dari semangat keislaman. AKP dilatarbelakangi dengan partai pendahulunya, yaitu partai Refah sedangkan FJP dengan Ikhwanul Muslimin. Walaupun AKP tidak secara frontal menyatakan diri sebagai partai Islam. Namun demikian, dalam setiap program dan kebijakan politik Pemerintahan Turki di bawah AKP mencerminkan artikulasi dari nilai-nilai Islam.

Ada anggapan yang menyatakan bahwa AKP merupakan representasi dari ideologi politik Ikhwanul Muslimin, mengingat dekatnya hubungan emosional dan spiritual pemimpin AKP dengan FJP. Kedua partai ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin melepaskan belenggu kediktatoran dan berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengakomodir nilai-nilai keislaman.

Anggapan kedekatan tersebut dapat ditelusuri pada tanggal 8 Februari 2011 sebelum rezim Husni Mubarak “jatuh”, salah satu petinggi Ikhwanul Muslimin Mesir, Ashraf Abdel Ghaffar bertolak menuju Turki. Kepergiannya ke Turki menjadi manuver politik penting bagi gerakan Ikhwan Mesir dalam rangka mengakhiri “cengkraman” Husni Mubarak selama tiga dasawarsa. Ghaffar meminta suaka politik kepada Pemerintah Turki dan tinggal di Turki hingga rezim Husni Mubarak tumbang oleh aksi protes rakyat. Ghaffar memuji peran yang dimainkan Pemerintah Turki dalam mendorong demokratisasi di Timur Tengah.

Ia berjanji di hadapan awak media Turki akan menjadikan AKP sebagai model Mesir pasca rezim Husni Mubarak lengser.⁸⁶

Keberadaan petinggi Ikhwanul Muslimin di Turki merefleksikan upaya diplomasi yang dilakukan Ikhwanul Muslimin secara formal seiring menguatnya peran regional Pemerintahan Erdogan. Ghaffar menjalankan peran sebagai *unofficial ambassador* Ikhwanul Muslimin yang menjadi penjembutan representasi kepentingan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan peran Turki. Seiring menguatnya pengaruh politik Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan demokrasi di Mesir. Turki secara *de facto* juga merepresentasikan dirinya sebagai pelindungnya. Cara yang dilakukan Turki yaitu dengan mendukung proses demokrasi Mesir. Hubungan Ikhwanul Muslimin dan AKP memberi warna politik domestik Mesir. Hubungan tersebut juga menguatkan peran politik Turki di kawasan Timur Tengah.

Hubungan dekat AKP dengan Ikhwanul Muslimin mewarisi kedekatan Ikhwanul Muslimin dengan gerakan *Milli Gorus*⁸⁷ Turki. Refleksi kedekatan Ikhwanul Muslimin dengan para tokoh AKP seperti Erdogan, Abdullah Gul dapat dilihat dari kehadiran para tokoh Ikhwanul Muslimin dalam pemakaman tokoh gerakan Islamis Turki, Necmetin Erbakan di Istanbul. Para tokoh tersebut yaitu Syekh Muhammad Mahdi Akef (mantan Mursyid Am Ikhwanul Muslimin Mesir), Khalid Meshal (pemimpin Hamas), Ibrahim Mounir (Pemimpin Ikhwanul Muslimin Inggris), Ali Bayanouni (mantan pemimpin Ikhwanul Muslimin Suriah), Rashid Al-Ghannoushi (pemimpin oposisi utama Tunisia), Abdur Rasheed Turabi (kepala Partai Islam di Kashmir).⁸⁸

⁸⁶ Ahmad Dzakirin. 2012. *Kebangkitan Pos-Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adicitra Intermedia. Hal. 224

⁸⁷ Salah satu organisasi diaspora Turki yang terkemuka di Eropa. Gerakan ini digambarkan sebagai organisasi Islam terbesar yang beroperasi di Barat. Gerakan *Milli Gorus* didirikan pada tahun 1969. Gerakan ini memiliki 87.000 anggota di seluruh Eropa, termasuk 50.000 di Jerman pada tahun 2005. Istilah ini juga mengacu pada "visi religius" dari organisasi yang menekankan pada kekuatan moral dan spiritual agama Islam dan menjelaskan penurunan dunia Muslim sebagai akibat dari imitasi nilai-nilai Barat (seperti sekularisme).

⁸⁸ Tim Redaksi. 2011. *Necmettin Erbakan's funeral expected to draw huge crowd*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/national_necmettin-erbakans-funeral-expected-to-draw-huge-crowd_236958.html pada tanggal 16 Maret 2015.

Kedekatan Ikhwan secara ideologis dan genekologis dengan Erbakan dapat dilihat dari sosok Ibrahim El Zayat, pemimpin *Federation of Islamic Organization in Europe* (FIOE) Jerman yang juga disebut dinas intelijen Jerman sebagai pemimpin Ikhwan Jerman yang berfusi dengan gerakan *Milli Gorus* (IGMG). Ibrahim el Zayat adalah tokoh Ikhwan Mesir yang dijatuhi hukuman 10 tahun oleh pengadilan militer Mesir karena dituduh sebagai pemimpin Mesir di perantauan. Ia menikah dengan keponakan Erbakan yang bernama Sabila El Zayat. Ibrahim Zayat berpartner dengan Gazi Misirli dan Cemalletin Kerim melalui FIOE dan lembaga afiliasinya. Misirli dan Kerim dianggap sebagai pimpinan penting Ikhwan di Turki. Misirli bergabung dalam asosiasi pebisnis Muslim yang bernama MUSIAD pada tahun 1998. Misirli menjabat wakil Presiden Hubungan Luar Negeri MUSIAD pada saat ini dan dikenal memiliki kedekatan hubungan dengan Erdogan.⁸⁹

Dari kedekatan tersebut, AKP mendukung penuh pemerintah Presiden Mursi. Hal tersebut dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Turki kepada Pemerintahan Mursi diawal masa jabatannya agar segera beranjak dari krisis ekonomi akibat revolusi 2011. Kedekatan antara FJP dan AKP ditambah dengan penguasaan parlemen Turki oleh AKP menjadikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen Turki dapat dengan mudah dikondisikan dalam merealisasikan kepentingan AKP dalam mendukung Pemerintahan Presiden Mursi.

b. Perwakilan Kader AKP Mendominasi Parlemen Turki

Kemenangan AKP dimulai sejak tahun 2002. Sejak saat itu, AKP mulai menduduki kursi parlemen dengan jumlah yang cukup besar. Kemenangan ini terus berlanjut sampai pada pemilu yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada tahun 2011. Pada pemilu 2011, AKP memperoleh 327 dari total 550 kursi di parlemen.⁹⁰ Jumlah ini melebihi setengah dari jumlah total kursi yang ada di parlemen.

⁸⁹ Ahmad Dzakirin. Op. cit

⁹⁰ Arabella Thorp. 2011. *Turkey's 2011 elections and beyond*. diakses dari www.parliament.uk/briefing-papers/SN06035.pdf pada tanggal 15 Februari 2015.

Artinya arus pembuatan kebijakan dapat dengan mudah diarahkan dan dikontrol sesuai dengan keinginan AKP.

Perwakilan kader AKP di parlemen Turki melebihi 50 persen dari jumlah kursi anggota parlemen. Jumlah tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Turki. Selain itu, baik Presiden ataupun Perdana Menteri Turki berasal dari kader AKP, menjadikan kepentingan AKP seperti tanpa halangan untuk diadopsi menjadi kebijakan negara. Mekanisme pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kemudian oleh Perdana Menteri dan diteruskan ke Parlemen.

c. Perubahan Doktrin Politik Luar Negeri Turki

Doktrin politik luar negeri Turki mengalami perubahan ketika AKP mulai menguasai Pemerintahan. Doktrin politik luar negeri Turki dirumuskan oleh menteri luar negeri Turki yang kemudian mendapat persetujuan dari Perdana Menteri, Perlemen dan Presiden. Perubahan doktrin politik luar negeri Turki yaitu perubahan yang dulunya lebih condong ke Barat berganti condong ke wilayah sekitar (*regionalism*) yang lebih dikenal dengan sebutan *Strategic Depth and Zero Problem*, yaitu suatu pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki yang lebih menitikberatkan pada hubungan yang seimbang dengan negara-negara di sekitarnya. Dengan demikian, strategi politik luar negeri Turki yang baru menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan dengan keterbukaan dan penerapan politik *soft power* kepada negara tetangga. Arah dan orientasi politik luar negeri ini telah secara signifikan juga telah mengubah sikap politik regional.

Melalui doktrin politik luar negeri tersebut, Turki kembali menjalin hubungan luar negeri yang lebih hangat dengan negara-negara yang dulu menjadi seterunya, seperti Rusia, Armenia, Yunani. Selain itu Turki memperluas

hubungan kerjasama diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah.⁹¹ Turki menjadi kiblat baru independensi dan harga diri masyarakat Muslim di Timur Tengah, penerapan bebas visa atas negara-negara Timur Tengah menarik jutaan turis Arab untuk berkunjung. Sementara itu, investasi dari timur Tengah membanjiri Turki dan menempati posisi terbesar kedua setelah investasi Uni Eropa.

Turki yang sebelumnya menjadi halangan dalam hubungan Timur Tengah dan Barat, kini justru memainkan peran katalis bagi kedua belah pihak. Turki berambisi untuk menjadi aktor utama dalam melakukan transformasi demokrasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Turki berupaya untuk membangun kepercayaan politik di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Implikasi dari doktrin politik luar negeri Turki bagi kawasan Timur Tengah yaitu terletak pada independensi dan keleluasaannya dalam memformulasi kepentingan dan kebijakan luar negeri. Politik luar negeri Turki bergeser dari strategi isolasionis menuju keterlibatan aktif (*politics of engagement*). Perilaku diplomasi Turki merefleksikan jalan sukses dalam meminimalisir konflik dan mendorong demokratisasi di kawasan Timur Tengah.

d. Dukungan Rakyat Turki Terhadap Presiden Mursi Mesir

Sejak pengumuman pelengseran Presiden Mesir, Muhammad Mursi pada tanggal 3 Juli 2013, rakyat Turki memadati jalanan kota di Turki untuk menolak keputusan tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2013, anggota dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Solidaritas untuk Masyarakat Tertindas (*Mazlum-DER*), Pegawai Negeri Sipil *Trade Union (Memur-Sen)* dan Konfederasi Serikat Pekerja Turki Estat Perdagangan (Hak-İş) berkumpul di depan kantor Kedutaan Mesir kota Ankara dan memprotes kudeta militer dengan membawa spanduk anti kudeta.⁹² Pada hari yang lainnya tetap di kota Ankara, di depan kedutaan Mesir dan

⁹¹ Ehud Toledano. 2011. *The AKP's New Turkey*. Diakses dari

<http://www.hudson.org/research/9846-the-akp-s-new-turkey> pada tanggal 3 Juli 2015

⁹² Tim Redaksi. 2013. *Unions hold anti-coup protest outside Egyptian Embassy in Ankara*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/latest-news-unions-hold-anti-coup-protest-outside-egyptian-embassy-in-ankara_320101.html pada tanggal 3 Juli 2015

Amerika Serikat, sekitar 3.000 pengunjung rasa melakukan doa bersama untuk para korban kudeta Mesir.⁹³ Lebih dari 1.000 pengunjung rasa berkumpul di depan masjid Istanbul, mereka mengutuk sikap yang dilakukan oleh Militer Mesir.⁹⁴ Penolakan tidak hanya dilakukan di jalanan tetapi juga melalui media sosial internet.

Reaksi penolakan rakyat Turki terhadap pelengseran Mursi berangkat dari kudeta Militer yang disertai dengan sikap kesewenang-wenangan Militer Mesir terhadap pengunjung rasa damai pro Mursi yang menewaskan ratusan orang. Rakyat Turki meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal, brutal dan tirani. Rakyat Turki bersatu dalam merespon kudeta militer Mesir 2013. Tidak hanya partai AKP yang menolak, partai CHP yang didirikan oleh Mustafa Kemal juga menolak dan menentang kudeta Mesir. Pimpinan partai CHP yaitu Kemal Kılıçdaroğlu mengatakan, “*Military coups cannot be accepted. I hope democracy will triumph soon*”.⁹⁵ (Kudeta Militer tidak dapat diterima. Saya harap demokrasi akan segera kembali).

Penentangan ini sebagai bentuk solidaritas sesama Muslim dan juga atas dasar pengalaman kudeta Militer yang dialami Turki di masa lalu. Dukungan rakyat Turki kepada Mursi semakin kuat dengan adanya *hashtags* #TurkeyWithMorsi di Twitter. *Hashtags* tersebut sempat menjadi *tranding topic* di Turki.⁹⁶

⁹³ Tim Redaksi. 2013. *Egypt, Turkey cancel navy drills as tensions rise*. Diakses dari <http://www.hurriyetaidailynews.com/egypt-turkey-cancel-navy-drills-as-tensions-rise.aspx?pageID=238&nID=52694&NewsCatID=359> pada tanggal 16 Februari 2015.

⁹⁴ Mutafa Akyol. 2013. *Turkey Condemns Egypt's Coup*. Diakses dari <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/reasons-turkey-against-egypt-coup.html> pada tanggal 14 Februari 2015

⁹⁵ Op. Cit

⁹⁶ Piotr Zalewski. 2013. *Did Egypt Experience a Coup? The West May Not Be Sure, but Turkey is*. Diakses dari <http://world.time.com/2013/07/08/did-egypt-experience-a-coup-the-west-may-not-be-sure-but-turkey-is/> pada tanggal 3 Juli 2015

Gambar 1. Aksi anti kudeta Mesir di jalanan kota Ankara, Turki



Sumber: Tim Redaksi. 2013. *Solidaritas warga Turki dan Italia untuk Rakyat Mesir*. Diakses dari http://www.eramuslim.com/berita/solidaritas-warga-turki-dan-italia-untuk-rakyat-mesir.htm#.VZYEo_D7ybl pada tanggal 14 Februari 2015

e. Faktor Sejarah

Kudeta militer pernah terjadi empat kali di Turki. Pertama pada tahun 1960 yaitu pada saat pemerintahan Adnan Menderes, kedua pada tahun 1971 ketika jabatan Perdana Menteri diduduki oleh Sulayman Demiral, ketiga pada tahun 1980 dan ke empat yaitu pada tahun 1997 ketika pemerintahan diduduki oleh Partai Refah. Kudeta tersebut dilakukan oleh militer Turki dengan alasan ingin menyelamatkan negara dan membuat Turki menjadi lebih baik. Selain itu, militer Turki beralasan ingin memurnikan semangat revolusi kemerdekaan Turki tahun 1924. Namun demikian, selama kurun waktu tersebut keadaan Turki justru tidak kunjung stabil. Kebebasan dalam berkeyakinan selalu ditekan, perekonomian negara tidak kunjung mandiri, krisis tidak bisa dihindari dan kesejahteraan rakyat belum terpenuhi dan memadai. Berikut pernyataan dari Perdana Menteri Erdogan tentang kepedihan atas kudeta Militer Turki masa lalu:

“Each military coup, with no exception, has caused Turkey to lose decades. Each military coup has paralyzed Turkish economy. Each military coup has caused the country, nation and young generations to

pay heavy prices".⁹⁷(Setiap kudeta militer, tanpa terkecuali, telah menyebabkan Turki kehilangan dekade. Setiap kudeta militer telah melumpuhkan ekonomi Turki. Setiap kudeta militer telah menyebabkan negara, bangsa dan generasi muda untuk membayar harga yang berat).

Pengalaman sejarah tersebut menjadi pendorong Turki untuk menolak kudeta militer Mesir tahun 2013. Turki tidak menginginkan pengalaman pahit yang pernah terjadi di Turki menimpa negara lain terlebih negara tersebut ada ikatan kedekatan sejarah dan emosi. Karena pada dasarnya kudeta hanya akan berakibat buruk baik dari segi politik ataupun ekonomi yang akan berakibat pada kesengsaraan rakyat. Terlebih budaya demokrasi sudah mulai tumbuh di Mesir yang seharusnya perlu mendapatkan dukungan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

4.3.2 Faktor Pertimbangan Eksternal Turki

Faktor pertimbangan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar negara Turki, baik karena kondisi politik, masyarakat ataupun sikap dari negara lain. Dimana faktor-faktor berhubungan atau mempengaruhi kepentingan negara Turki. Faktor-faktor eksternal tersebut yaitu:

a. Presiden Mursi Terpilih Secara Demokratis

Pemilu Mesir tahun 2012 berakhir dengan kemenangan Muhammad Mursi. Pemilu tersebut merupakan pemilu yang paling demokratis selama berdirinya negara Mesir. Pemilu tersebut juga merupakan pemilu pertama yang dimenangkan oleh masyarakat sipil setelah sebelumnya selalu dimenangkan oleh pihak yang berlatar belakang dari militer.

Muhammad Mursi memenangkan pemilu selama dua putaran berturut-turut. Pada putaran pertama Mursi memperoleh suara sebanyak 5.764.952 pemilih atau setara dengan 24.78% dari tiga belas kandidat. Sedangkan pada putaran

⁹⁷ Tim Redaksi. 2013. *Turkey PM blasts Egypt 'coup' as enemy of democracy*. Diakses dari <http://www.ynetnews.com/articles/0.7340.L-4401290.00.html> pada tanggal 4 Juli 2015

kedua Mursi memperoleh suara sebanyak 13.230.131 atau setara dengan 51.73% dari dua kandidat.⁹⁸

Polemik Pro-Kontra terhadap kebijakan Presiden Mursi memang terjadi di Mesir. Terdapat kubu yang mendukung dan ada pula yang menentang. Perbedaan pandangan antara dua kubu adalah sesuatu yang wajar dalam perjalanan negara demokrasi, yang menjadi tidak wajar adalah ketika salah satu kubu tidak dapat menerima kekalahan dan membuat keonaran yang berujung pada konflik. Perbedaan pandangan yang berakhir pada konflik seyogyanya tidak terjadi. Karena dalam sistem demokrasi semua pihak dituntut untuk bersikap lapang dada dalam menerima suatu hasil keputusan, terlebih keputusan tersebut diambil melalui pemilihan umum dan referendum.

Melihat proses terpilihnya Mursi dengan cara demokratis dan kudeta penurunannya, sikap Turki melalui pidato Erdogan mengatakan,

*“I have consistently said at international platforms that I do not accept Sisi as the president. Today, I am also saying the same thing. To me, the president of Egypt is not Sisi, it is still Morsi. It is not possible for us who believe in democracy to accept such a coup”.*⁹⁹ (Saya tetap konsisten mengatakan kepada platform internasional bahwa saya tidak mengakui Sisi sebagai presiden. Hari ini, saya juga mengatakan hal yang sama. Bagi saya, presiden Mesir bukan Sisi, akan tetapi Mursi. Hal tersebut tidak mungkin bagi kita yang percaya pada demokrasi untuk menerima kudeta tersebut).

Menurut pernyataan di atas, Turki sangat menentang kudeta Militer Mesir tahun 2013. Menurut Turki, suatu keputusan yang dihasilkan oleh suara rakyat (pemilu) tidak dapat dibatalkan atau digugurkan dengan cara apapun kecuali dikembalikan lagi kepada rakyat. Suara rakyat adalah hal yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

⁹⁸ Tim Redaksi. 2012. *Muslim Brotherhood's Mursi declared Egypt President*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-18571580> pada tanggal 14 Februari 2015

⁹⁹ Jack Moore. 2015. *Turkey's Erdoğan: 'Morsi is Egypt's president, not Sisi'*. Diakses dari <http://europe.newsweek.com/turkeys-erdo-morsi-egypts-president-not-sisi-327640> pada tanggal 4 Juli 2015

b. Militer Mesir Menggunakan Cara Represif Untuk Menurunkan Presiden Mursi

Penurunan Muhammad Mursi dari jabatan Presiden Mesir pantas disebut sebagai kudeta militer karena dilakukan dengan menggunakan cara represif. Awal mula kudeta militer dilakukan ketika ada demonstrasi besar-besaran pada tanggal 30 Juni 2012. Aksi tersebut terdiri dari kubu pro maupun yang kontra dengan Pemerintah. Kejanggalan yang dilakukan oleh aparat keamanan yaitu, aparat keamanan yang semestinya bersikap di tengah, netral dan menjaga situasi dan keamanan para pendemo agar tidak bentrok, justru lebih memihak pada tuntutan oposisi yang terdiri dari kelompok-kelompok liberal, sekuler, komunis, dan nasionalis. Yaitu dengan menurunkan kekuasaan Presiden Mursi.

Keberpihakan sikap militer dapat dilihat dari aksi pembubaran yang dilakukannya pada pendukung pemerintah tetapi tidak pada kubu oposisi. Pembubaran yang dilakukan disertai dengan sikap represif, seperti yang terjadi di Nahdhoh Square, Rabah Adawiyah, Alexandria, Minya, Assiut, Fayoum dan Suez, serta di provinsi Buhayra dan Beni Su.¹⁰⁰ Peralatan militer begitu mudah ditemui di jalan-jalan, mulai dari kendaraan *Water Canon*, *tank* bahkan selongsong peluru laras panjang yang berserakan di jalan-jalan. Tindakan represif dilakukannya pada waktu jamaah Sholat Subuh pada tanggal 8 Juli. Sebanyak 53 orang tewas termasuk 5 anak-anak dan 2 bayi,¹⁰¹ dan pada tanggal 27 Juli sebanyak 74 orang. Rata-rata para korban terkena luka tembakan di bagian dada, leher ataupun kepala.¹⁰²

Pada tanggal 13 Agustus 2013 terjadi kembali penyerangan antara militer dengan demonstran di kamp Rab'a. Suasana semakin tidak terkendali, helikopter menjatuhkan gas racun, dan tembakan peluru tajam dari senapan otomatis tidak

¹⁰⁰ Rita Uli Hutapea. 2013. *Usai Pembantaian Pendukung Morsi, Kerusuhan di Mesir Meluas*. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2013/08/15/144611/2330800/1148/usai-pembantaian-pendukung-morsi-kerusuhan-di-mesir-meluas> pada tanggal 15 Februari 2015

¹⁰¹ (Video) *Beginilah Pembantaian Jama'ah Subuh Pendukung Mursi*. 2013. Diakses dari <http://www.bersamadakwah.com/2013/07/video-beginilah-pembantaian-jamaah.html> pada tanggal 14 Desember 2014

¹⁰² Michael Mansfield and Tayab Ali. 2013. *Egypt's military will not get away with human rights abuses*. Diakses dari <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/14/egypt-military-human-rights-abuses> pada tanggal 14 Desember 2014

henti-hentinya memburu para demonstran yang seluruhnya adalah warga sipil. Serangan ini merupakan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh militer Mesir terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Korban tewas dalam serangan ini yaitu kurang lebih 500 orang dan 2000 mengalami luka-luka.¹⁰³ Sejak Presiden Mursi dilengserkan, tepatnya sejak para pendukung Muhammad Mursi melakukan demonstrasi damai, militer Mesir telah membunuh lebih dari 800 orang dan melukai lebih dari 20.000 demonstran yang seluruhnya adalah warga sipil. Jumlah tersebut yang hanya dihitung di kawasan konsentrasi massa pendukung Mursi di Rab'a al Adawiya.¹⁰⁴

Sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, berpenduduk mayoritas Muslim, dan sebagai pejuang demokrasi dan kemanusiaan, Turki menentang tindakan represif yang dilakukan oleh Militer Mesir. Apalagi tindakan tersebut telah menelan banyak korban jiwa, seperti yang terjadi di kawasan konsentrasi massa pendukung Mursi di Rab'a al Adawiya. Mengenai hal tersebut Erdogan mencetuskan simbol Rabia yang berupa mengangkat empat jari tangan kanan. Simbol tersebut menggambarkan perlawanan terhadap tindakan represif militer Mesir. Mengenai hal tersebut Perdana Menteri Erdogan menyatakan sebagai berikut:

*“Egypt issue was not only about our Egyptian brothers, but also about humanity. Rabia sign is not only a sign of the right case of Egyptians, but also a sign of saying no to injustices, suppressions, crackdowns, massacres and coup in all over the world”.*¹⁰⁵ (Kasus Mesir tidak hanya tentang saudara kami di Mesir, tetapi juga tentang kemanusiaan. Rabia tidak hanya tanda untuk kasus hak di Mesir, tetapi juga tanda sebagai simbol penentangan terhadap ketidakadilan, supresi, kekerasan, pembantaian dan kudeta di seluruh dunia).

¹⁰³ Afandi Satya .K. 2013. *Balada Pembantaian Mesir*. diakses dari <http://www.arahmah.com/kontribusi/balada-pembantaian-mesir.html> pada tanggal 14 Desember 2014

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Tim Redaksi. 2013. *Turkey PM Erdogan comment "Rabia Sign"*. Diakses dari <http://www.r4biaplatform.com/content/news-story/turkey-pm-erdogan-comment-rabia-sign> pada tanggal 4 Juli 2015

c. Turki Sependapat dengan Kebijakan Mursi untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina

Turki di bawah pimpinan AKP mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Ia dengan tegas mengatakan bahwa persoalan bangsa Palestina menjadi urusan domestik rakyat Turki. Pada diskusi panel di *World Economic Forum* di Davos, Swiss bulan Oktober 2009, Perdana Menteri Erdogan mengkritik pedas Presiden Israel, Shimon Perez yang juga hadir sebagai narasumber, atas agresi Israel yang menewaskan lebih dari 2000 warga sipil Palestina.¹⁰⁶

Pemerintah Turki mendukung aksi kemanusiaan *Gaza Freedom Flotilla* untuk mengakhiri blokade Israel atas penduduk Gaza, Palestina Mei 2010. Aksi tersebut melibatkan enam kapal termasuk Mavi Marmara dan 663 peserta dari 37 negara. Namun demikian, aksi kemanusiaan tersebut berujung bentrok. Militer Israel menyerbu kapal Mavi Marmara di perairan internasional dan menewaskan 8 warga Turki dan satu warga negara Amerika keturunan Turki.

Turki dibawah pimpinan AKP melihat bahwa kemenangan Presiden Muhammad Mursi di Mesir akan membawa dampak positif bagi hubungan Turki-Palestina. Hal tersebut dikarenakan, tidak lama setelah Muhammad Mursi menjabat presiden Mesir, Mesir membuka pintu gerbang perbatasan dengan Palestina sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Pembukaan pintu gerbang ini walaupun tidak permanen akan tetapi dapat memberikan harapan kepada rakyat palestina untuk dapat terbebas dari isolasi Israel.¹⁰⁷ Melihat kondisi tersebut Perdana Menteri Erdogan berencana akan melakukan kunjungan ke Palestina melalui pintu perbatasan tersebut.¹⁰⁸ Namun demikian, dengan dilengserkannya Presiden Mursi melalui kudeta 2013 yang juga berpengaruh pada kebijakan di perbatasan Rafah, keinginan Perdana Menteri Erdogan untuk mengunjungi Palestina tidak terealisasi. Dukungan yang diberikan Turki kepada

¹⁰⁶ Tim Redaksi. 2009. *What Turkish PM, Tayyip Erdogan told Shimon Peres in Davos*. Diakses dari http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_29547.shtml pada tanggal 16 Februari 2015

¹⁰⁷ Tim Redaksi. 2012. *Gaza: Egypt opens border ahead of Eid holiday*. Diakses dari <http://www.arabnews.com/gaza-egypt-opens-border-ahead-eid-holiday> pada tanggal 4 Juli 2015

¹⁰⁸ Yahya Bostan and Duygu Guvenc. 2013. *Turkish premier planning trip to Gaza via Egypt*. Diakses dari https://wikileaks.org/gifiles/docs/69/698235_israel-turkey-egypt-turkish-premier-planning-trip-to-gaza.html pada tanggal 4 Juli 2015

Palestina tidak bisa dilepaskan dari perubahan teori politik luar negeri Turki. Turki berkeinginan untuk menjadi pelopor hak asasi dan nilai demokratis di kawasan Timur tengah.

d. Tindakan Represif Militer Mesir Kurang Mendapatkan Perhatian dari Negara-negara Dunia

Sistem demokrasi adalah sistem yang paling populer di negara-negara dunia, terutama di negara Barat. Semua negara menyatakan dirinya bertindak atas nama kebebasan dan kehendak rakyat. Sebagai pendukung dan pembela sistem demokrasi, soyogyanya, negara-negara di dunia ketika melihat pelanggaran terhadap mekanisme demokrasi, segera mengambil tindakan yang konkret untuk mengingatkan ataupun meluruskan. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan, Libya ataupun Irak.

Pada kasus Mesir, hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh negara-negara besar di dunia. Amerika Serikat yang terkenal dengan negara paling demokratis tidak memberikan sikap yang tegas. Begitu juga Inggris, Perancis, Australia ataupun Indonesia. Berbeda dengan Turki, Turki segera menentukan sikap tegas untuk menolak kudeta militer Mesir dan meminta proses pergantian kekuasaan dikembalikan pada mekanisme yang sudah diujalakan, yaitu pemilu. Dalam pertemuan pers di Ankara Perdana Menteri Erdogan mengatakan sebagai berikut:

“I am calling on Western countries. You remained silent in Gaza, you remained silent in Syria ... You are still silent on Egypt. So how come you talk about democracy, freedom, global values and human rights”.¹⁰⁹
(Saya menyerukan kepada negara-negara Barat. Kalian diam pada peristiwa di Gaza, begitu juga di Suriah... dan kalian tetap diam dengan peristiwa di Mesir. jadi bagaimana kalian berbicara tentang demokrasi, kebebasan, nilai-nilai global dan hak asasi manusia).

Kecepatan Turki dalam merespon kudeta militer di Mesir tahun 2013 diharapkan mampu menggugah kesadaran negara-negara besar untuk mengikuti

¹⁰⁹ Junathon Burch. 2013. *Turkish PM calls for U.N. Security Council to convene on Egypt*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2013/08/15/us-egypt-protests-turkey-idUSBRE97E0C520130815> pada tanggal 5 Juli 2015

langkah yang ditempuh oleh Turki dalam menegakkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dari pertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal di atas, Turki memutuskan untuk menolak kudeta militer Mesir. Hal tersebut karena sesuai dengan kondisi ataupun keadaan yang sedang dihadapi dan diyakini oleh Turki.

4.4 Implikasi Hubungan Turki dengan Mesir Pasca Kudeta

Setelah penolakan dan penentangan Pemerintah Turki terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir tahun 2013, hubungan Turki dengan Mesir mengalami ketegangan. Pemerintah sementara Mesir pasca kudeta Presiden Muhammad Mursi tidak menerima pernyataan Turki bahwa apa yang telah dilakukannya adalah kudeta. Terlebih dalam setiap kesempatan berkunjung ke negara-negara lain ataupun di dalam forum PBB, Turki selalu membicarakan penurunan Muhammad Mursi dari Presiden Mesir adalah kudeta.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Pemerintah Turki maka, Mesir memutuskan untuk memulangkan Duta Besar Turki yang berada di Mesir. Begitu juga dengan Pemerintahan Turki, memulangkan Duta Besar Mesir yang berada di Turki, artinya kedua negara mem-*persona non grata* kepada masing-masing Duta Besar. Kedua negara memutuskan hubungan diplomatik dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Pemulangan Duta Besar Mesir yang berada di Turki, bukan merupakan bentuk penentangan Pemerintah Turki terhadap rakyat Mesir, akan tetapi sebagai bentuk penentangan Pemerintah Turki terhadap pemerintah sementara Mesir yang notabene adalah hasil kudeta. Dalam pidatonya di kota Trabzon, Turki, Perdana Menteri Erdogan menyatakan sebagai berikut:

“We have taken similar action to the coup's action against our ambassador. Our position is not directed against the Egyptian people but only against the coup regime. We support the struggle for democracy in the world. And we sincerely respect those who respect the will of the people. We have retaliated against the Egyptian move and gave the Egyptian ambassador and charge d'affaires until November 29th to leave

Turkey".¹¹⁰ (Kami telah melakukan tindakan yang sama seperti halnya yang dilakukan pada Duta Besar kami. Tindakan tersebut tidak kami maksudkan terhadap rakyat Mesir tetapi hanya terhadap rezim kudeta. Kami mendukung perjuangan untuk demokrasi di dunia. Dan kami sangat menghormati mereka yang menghormati kehendak rakyat. Kami telah membalas langkah Mesir dengan memulangkan Duta Besar Mesir, maksimal mereka harus meninggalkan Turki pada tanggal 29 November).

Pemutusan hubungan diplomatik tersebut berpengaruh pada kerjasama-kerjasama yang telah dan yang akan dilakukan oleh Turki dengan Mesir. Menurut Menteri Perencanaan dan Kerjasama Internasional Mesir, Ashraf al-Arabi, ketegangan politik antara Kairo dan Ankara telah menyebabkan penangguhan kesepakatan bantuan Turki kepada Pemerintah Mesir sebesar \$ 1 miliar.¹¹¹ Dalam bidang perdagangan dan transportasi, sebuah perusahaan bus Turki membatalkan pengiriman 600 unit bus ke Mesir.¹¹² Selain itu, Pemerintah Mesir sendiri memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian perdagangan bebas antara Turki dengan Mesir yang akan berakhir pada Maret 2015.¹¹³ Dalam bidang pertahanan, Turki telah menghentikan pengiriman kendaraan udara tanpa awak buatan Turki 'ANKA' ke Mesir. Turki juga membatalkan latihan gabungan angkatan laut dengan tentara Mesir yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013.¹¹⁴

Sikap penolakan dan penentangan kudeta militer Mesir tahun 2013 oleh Turki, yang berujung pada ketegangan hubungan diplomatik antara Turki dengan Mesir bukan sesuatu yang perlu dikuatirkan bagi Turki. Hal tersebut tidak akan

¹¹⁰ Tim Redaksi. 2013. *Erdogan retaliates and raises Adawiya four fingers symbol*. Diakses dari <https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/8485-erdogan-retaliates-and-raises-adawiya-four-fingers-symbo> pada tanggal 4 Juli 2015

¹¹¹ Tim Redaksi. 2013. *Political tensions freeze Turkey's credit line to Egypt: Minister*. Diakses dari <http://www.aa.com.tr/en/news/229520--political-tensions-freeze-turkeys-credit-line-to-egypt-minister> pada tanggal 16 Februari 2015.

¹¹² Namir Galal. 2013. *Turkey freezes deal to import buses to Egypt: media*. Diakses dari <http://www.egyptindependent.com/news/turkey-freezes-deal-import-buses-egypt-media> pada tanggal 16 Februari 2015.

¹¹³ Doğan. 2013. *Egypt to unilaterally cancel trade agreement signed with Turkey during Morsi rule*. Diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/egypt-to-unilaterally-cancel-trade-agreement-signed-with-turkey-during-morsi-rule.aspx?PageID=238&NID=73573&NewsCatID=344> pada tanggal 16 Februari 2015.

¹¹⁴ Tim Redaksi. 2013. *Egypt, Turkey cancel navy drills as tensions rise*. Diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/egypt-turkey-cancel-navy-drills-as-tensions-rise.aspx?pageID=238&nID=52694&NewsCatID=359> pada tanggal 16 Februari 2015.

berdampak besar bagi Turki. Karena dari segi politik, pertahanan, ekonomi dan teknologi Turki berada di atas Mesir. Sikap penolakan tersebut artinya bisa dikatakan sebagai ancaman Turki kepada Mesir untuk segera mengembalikan keputusan legal, yang sesuai dengan kehendak rakyat yaitu pada pemilu 2012.



BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, penolakan Pemerintah Turki di bawah *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) terhadap kudeta militer Mesir tahun 2013 dilatarbelakangi oleh pertimbangan internal dan eksternal. Faktor pertimbangan internal yaitu 1) kedekatan hubungan antara *Adalet Ve Kalkinma Partisi* dengan *Ikhwanul Muslimin* Mesir, 2) Parlemen Turki yang mayoritas diduduki oleh perwakilan *Adalet Ve Kalkinma Partisi*, 3) perubahan doktrin politik luar negeri Turki sejak *Adalet Ve Kalkinma Partisi* memimpin Turki, 4) dukungan rakyat Turki untuk menolak kudeta militer Mesir, 4) pengalaman sejarah empat kali kudeta yang dialami oleh Turki. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu, 1) mekanisme pemilihan Presiden Mursi yang demokratis, 2) sikap militer yang represif terhadap pengunjuk rasa pendukung Presiden Mursi, 3) Turki sependapat dengan kebijakan Mursi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, 4) tindakan represif militer Mesir kurang mendapatkan perhatian dari negara-negara dunia.

Dari beberapa faktor baik secara internal ataupun eksternal maka penolakan Turki atas kudeta militer Mesir tahun 2013 adalah pilihan yang paling tepat. Hal tersebut disamping untuk menjaga stabilitas perpolitikan di dalam negeri Turki, juga untuk meyakinkan kepada negara-negara dunia bahwa Turki merupakan negara demokrasi dan berusaha menjadi pelopor demokrasi di kawasannya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Alpkaya, Faruk. 1998. *Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: 1923-1924*. Istanbul: İletişim.
- Banyu Perwita, Anak Agung dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Barkey, Henri J. 2011 "*Turkish Foreign Policy and Middle East.*" *CERI Strategy Papers*.
- Dzakirin, Ahmad. 2012. *Kebangkitan Pos-Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Fluehr, Carolin, Lobban. 2004. *Islamic Societies in Practice*, edisi kedua. Florida: University Press of Florida.
- Jensen, Lloyd. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mughni, Syafiq A. 1999. *Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki*.Tangerang Selatan: Logos.
- Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds).1962. *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the Study of International Politics*. New York: The Free Press
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, kualitatif &R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Yanuardi. 2013. *Presiden Mursi, kisah ketidakutan dunia pada kekuatan Ikhwanul Muslimin*.Yogyakarta: Penerbit Hayyun Media
- Taghian, Syarif. 2011. *Erdogan Muadzsin Istanbul Penakluk Sekulerisme Turki*. Jakarta: Pustidaka Al-Kautsar.

- Erdogan, Mustafa. Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam, dalam Atila Yayla. 2004. *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar*. Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung.
- Nordlinger, Eric A. 1994. *Militer dalam politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Terjemahan oleh Drs. Sahat Simamora.
- Yavuz, M. Hakan. 2006. *Conservative Democracy and the Globalization of Freedom*. Salt Lake: University of Utah Press.
- Varma, SP. 2010. *Teori politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. edisi I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, M.Asror. 2009. *Persinggungan Islam dan Barat*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Zurcher, Erik J. 2004. *The Kemalist One-Party State dalam Turkey A Modern History*. New York NY 10010.

Jurnal

- Almuedo, Ana. 2011. "New Turkish Foreign Policy Towards Middle East." *European Institute of the Mediterranean*. Volume 4 dari *Papers IEMed*, September.
- Lecha, Eduard Soler i. 2011. "The Conceptual Architecture of Turkish Foreign Policy: An Update in Light of Regional Turbulence." *CIDOB Documents*, June.

Artikel

- Bostan, Yahya and Guvenc, Duygu. 2013. *Turkish premier planning trip to Gaza via Egypt*. Diakses dari https://wikileaks.org/gifiles/docs/69/698235_israel-turkey-egypt-turkish-premier-planning-trip-to-gaza.html
- Constitution of The Republic of Turkey*. 2005. Diakses dari http://www.global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
- Chulov, Martin. 2013. *Egypt's military arrest Muslim Brotherhood supreme leader*. Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/04/egypt-military-arrest-warrants-Muslim-brotherhood>
- Jones, Dorian. 2013. *Türkiye Mısır'daki Darbeyi Kinadı*. diakses dari <http://www.amerikaninsesi.com>

- Fouad, T, MD. 2011. *Egypt and Turkey, an Axis against Democracy?*.
<http://democrati.net/2011/09/30/egypt-and-turkey-an-axis-against-democracy/>
- Mansfield, Michael and Ali, Tayab. 2013. *Egypt's military will not get away with human rights abuses*. Diakses dari
<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/14/egypt-military-human-rights-abuses>
- Ministry of Economy. 2013. *Egypt*. Diakses dari
<http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=38F8CD2A-E5A3-F61A-550A3A023E4B7756>
- Plofchan, Thomas.2012. *Candidates in the 2012 Egyptian Presidential Election*. Diakses dari
<http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Pages/articleDetails.aspx?aid=162>
- Taşpınar, Ömer. 2012. *Turkey: The New Model?* Diakses dari
<http://www.brookings.edu/research/papers/2012/04/24-turkey-new-model-taspinar>
- Thorp, Arabella. 2011. *Turkey's 2011 elections and beyond*. diakses dari
www.parliament.uk/briefing-papers/SN06035.pdf
- Tim Redaksi. 2013. *How Atatürk Made Turkey Secular*. diakses dari
<http://lostislamichistory.com/how-ataturk-made-turkey-secular/>
- Tim Redaksi. 2007. *History of The Justice and Develo Perdana Menterient Party*. Diakses dari
<http://www.akparti.org/turk.html>
- Tim Redaksi. *Political parties in Turkey*. 2010. Diakses dari
<http://www.allaboutturkey.com/parti.htm>
- Tim Redaksi. 2009. *Party History*. Diakses dari
http://www.chp.org.tr/en/?page_id=67
- Tim Redaksi. 2012. *Duties and Powers*. Diakses dari
<http://www.tccb.gov.tr/pages/Presidency/power/>
- Tim Redaksi. 2014. *Embassy History and Previous Ambassadors*.
<http://cairo.emb.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx>
- Tim Redaksi. 2013. *Free Trade Agreement between Egypt & Turkey*. Diakses dari
<http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=1361#.VNHFoCyE5H0>
- Tim Redaksi. 2010. *Turkey-Egypt Economic and Trade Relations*. Diakses dari
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-egypt.en.mfa

Toledano, Ehud. 2011. *The AKP's New Turkey*. Diakses dari <http://www.hudson.org/research/9846-the-akp-s-new-turkey>

Walker, Joshua W. 2009. *Introduction: The Sources of Turkish Grand Strategy- 'Strategic Depth' and 'Zero-Problem' in Context*. Diakses dari www.lse.ac.uk/IDEAS/.../pdf/.../introduction.pdf

Yeghig Tashjian. 2012. *From Conceptualization to Implementation and Revaluation: Turkey's "Strategic Depth" in the MENA region*. diakses dari www.strategicoutlook.org

Berita Internet :

Akyol, Mutafa. 2013. *Turkey Condemns Egypt's Coup*. Diakses dari <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/reasons-turkey-against-egypt-coup.html> pada tanggal 14 Februari 2015

Al Arabiya with AFP. 2012. *Egypt to hold referendum in two stages due to shortage of judges*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/articles/2012/12/11/254547.html> pada tanggal 7 Februari 2015

Al Jazeera. 2012. *Egypt's Morsi defies military in fiery speech*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/06/201262916347287161.html> pada tanggal 15 Maret 2015

Aljazeera. 2013. *Egypt's military shuts down news channels*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/2013740531685326.html> pada tanggal 7 Februari 2015

Aljazeera. 2013. *Egypt's Morsi says he will not step down*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/20137222343142718.html> pada tanggal 7 Februari 2015

Annisa, Palupi, Auliani. 2013. *Turki Tarik Dubes di Mesir dan Kecam Standar Ganda Barat atas Situasi Mesir*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/16/0515267/contact.html>, pada tanggal 30 Oktober 2014

Burch, Junathon. 2013. *Turkish PM calls for U.N. Security Council to convene on Egypt*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2013/08/15/us-egypt-protests-turkey-idUSBRE97E0C520130815> pada tanggal 16 Februari 2015

Doğan. 2013. *Egypt to unilaterally cancel trade agreement signed with Turkey during Morsi rule*. Diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/egypt-to-unilaterally-cancel-trade-agreement-signed-with-turkey-during-morsi-rule.aspx?PageID=238&NID=73573&NewsCatID=344> pada tanggal 16 Februari 2015

- Galal, Namir. 2013. *Turkey freezes deal to import buses to Egypt: media*. Diakses dari <http://www.egyptindependent.com/news/turkey-freezes-deal-import-buses-egypt-media> pada tanggal 16 Februari 2015
- Karamuk, Oguz. 2012. *Will Erdogan's Policies Endanger Turkish Investments in Egypt?*. diakses dari <http://www.al-monitor.com/pulse/fa/business/2013/07/turkey-businessmen-egypt-fear-erdogan-support-morsi.html#> pada tanggal 30 Oktober 2015
- Masr, Mada. 2013. *Erdogan refuses to meet ElBaradei*. Diakses dari <http://www.madamasr.com/news/erdogan-refuses-meet-elbaradei> pada tanggal 6 Februari 2015
- Moore, Jack. 2015. *Turkey's Erdoğan: 'Morsi is Egypt's president, not Sisi'*. Diakses dari <http://europe.newsweek.com/turkeys-erdo-morsi-egypts-president-not-sisi-327640> pada tanggal 16 Februari 2015
- Purwadi, Didi. 2013. *Turki Kecam Sikap Eropa Yang Tidak Berani Sebut 'Kudeta Mesir'*. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah> pada tanggal 14 Desember 2014
- Primus, Josephus. 2011. *Turki jabat Erat Mesir* diakses dari <http://internasional.kompas.com/> pada tanggal 1 Desember 2014
- Redaksi Sinai. 2013. *Rabia Simbol Keteguhan dan Perlawanan*. Diakses dari <http://www.sinaimesir.net/2013/08/rabia-simbol-keteguhan-dan-perlawanan.html> pada tanggal 1 November 2015
- Reuters. 2013. *Egypt's Morsi invites opposition to dialogue on elections*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/latest-news_egypts-morsi-invites-opposition-to-dialogue-on-elections_308046.html pada tanggal 7 November 2015
- Satya, Afandi .K. 2013. *Balada Pembantaian Mesir*. diakses dari <http://www.arahmah.com/kontribusi/balada-pembantaian-mesir.html> pada tanggal 14 Desember 2014
- Shadid, Anthony. 2011. *Turkey Predicts Alliance With Egypt as Regional Anchors*. Diakses dari http://www.nytimes.com/2011/09/19/world/middleeast/turkey-predicts-partnership-with-egypt-as-regional-anchors.html?pagewanted=all&_r=0 pada tanggal 4 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2004. *cumhuriyetin kuruluş tarihi nedir*. Diakses dari <http://www.turkcebilgi.com/cumhuriyetin-kurulusu-tarihi> pada tanggal 25 November 2014
- Tim Redaksi. *Constitution of the Republic of Turkey* diakses dari <http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa> pada tanggal 16 Januari 2015

- Tim Redaksi. 2012. *Egypt's constitution passes with 63.8 percent approval rate*. Diakses dari <http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate> pada tanggal 7 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Egypt, Turkey cancel navy drills as tensions rise*. Diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/egypt-turkey-cancel-navy-drills-as-tensions-rise.aspx?pageID=238&nID=52694&NewsCatID=359> pada tanggal 16 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2012. *Egypt's Morsi visits Turkey to strengthen emerging alliance*. Diakses dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/54291/Egypt/Politics-/Egypts-Morsi-visits-Turkey-to-strengthen-emerging-.aspx> pada tanggal 14 Maret 2015
- Tim Redaksi. 2012. *Muslim Brotherhood's Mursi declared Egypt President*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-18571580> pada tanggal 14 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2011. *Turki bantu Mesir di masa transisi demokrasi*. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110913_turkey_egypt.shtml pada tanggal 1 November 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Turkey Calls Morsi's Removal 'Unacceptable Coup'*. Diakses dari <http://www.voanews.com/content/turkey-morsi-reaction/1695408.html> pada tanggal 16 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2011. *Turkey expects to team with Egypt*. Diakses dari http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/09/19/Turkey-expects-to-team-with-Egypt/48851316421000/ pada tanggal 4 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Massacre in Cairo deepens Egypt crisis*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/20137821320932698.html> pada tanggal 7 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2014. *Memori yang Tidak Boleh Lupa*. Diakses dari <http://www.eraMuslim.com/berita/tahukah-anda/eropa-dan-kemal-attarturk-hancurkan-setiap-aktifitas-yang-inginkan-khilafah-islam.htm#.VMg3fyyE5H0> pada tanggal 25 November 2015
- Tim Redaksi. 2011. *Necmettin Erbakan's funeral expected to draw huge crowd*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/national_necmettin-erbakans-funeral-expected-to-draw-huge-crowd_236958.html pada tanggal 16 Maret 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Political tensions freeze Turkey's credit line to Egypt: Minister*. Diakses dari <http://www.aa.com.tr/en/news/229520--political-tensions-freeze-turkeys-credit-line-to-egypt-minister> pada tanggal 16 Februari 2015

- Tim Redaksi. 2007. *Turkish military issues warning*. Diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/08/2008525121411742479.html> pada tanggal 16 Januari 2015
- Tim Redaksi. 2014. *Turkey's Erdogan refused sitting on table with Egypt's Sisi*. Diakses dari <http://www.worldbulletin.net/news/145266/turkeys-erdogan-refused-sitting-on-table-with-egypts-sisi> pada tanggal 1 November 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Turki Cabut Larangan Jilbab*. Diakses dari <http://www.dw.de/turki-cabut-larangan-jilbab/a-17125105> pada tanggal 14 Desember 2014
- Tim Redaksi. 2013. *Turkey and Egypt losing ground as diplomatic dispute grows*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-and-egypt-losing-ground-as-diplomatic-dispute-grows_332723.html pada tanggal 1 November 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Turkey PM blasts Egypt 'coup' as enemy of democracy*. Diakses dari <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4401290,00.html> pada tanggal 16 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2013. *Turkey PM Erdogan comment "Rabia Sign"*. Diakses dari <http://www.r4biaplatform.com/content/news-story/turkey-pm-erdogan-comment-rabia-sign> pada tanggal 16 Februari 2015
- Tim Redaksi. 2012. *Gaza: Egypt opens border ahead of Eid holiday*. Diakses dari <http://www.arabnews.com/gaza-egypt-opens-border-ahead-eid-holiday> pada tanggal 16 Februari 2015
- Uli, Rita, Hutapea. 2013. *Usai Pembantaian Pendukung Morsi, Kerusuhan di Mesir Meluas*. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2013/08/15/144611/2330800/1148/usai-pembantaian-pendukung-morsi-kerusuhan-di-mesir-meluas> pada tanggal 15 Februari 2015
- (Video). 2013. *Beginilah Pembantaian Jama'ah Subuh Pendukung Mursi*. Diakses dari <http://www.bersamadakwah.com/2013/07/video-beginilah-pembantaian-jamaah.html> pada tanggal 14 Desember 2014
- Werr, Patrick. 2012. *Turkey to provide Egypt with \$2 billion in finance*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2012/09/15/us-egypt-turkey-finance-idUSBRE88E0BQ20120915> pada tanggal 14 Maret 2015
- Zalewski, Piotr. 2013. *Did Egypt Experience a Coup? The West May Not Be Sure, but Turkey is*. Diakses dari <http://world.time.com/2013/07/08/did-egypt-experience-a-coup-the-west-may-not-be-sure-but-turkey-is/> pada tanggal 16 Februari 2015